



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sampai dengan triwulan I terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
6. Perubahan RKPD adalah perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

## Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### SISTEMATIKA

## Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan;
- b. bab II evaluasi hasil triwulan I (satu) tahun berkenaan;
- c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. bab VI penutup.

## Pasal 4

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Mei 2025  
BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara langsung maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tahun keempat RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, RKPD dapat mengalami perubahan apabila terdapat dinamika dan kondisi aktual yang berkembang, sebagaimana diatur dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan hasil evaluasi capaian RKPD berjalan, memperhatikan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta penyelarasannya dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Di samping itu, perubahan juga dilakukan untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta menyesuaikan arahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025, pemerintah daerah didorong untuk mengarahkan kembali

kebijakan pembangunan secara responsif terhadap isu-isu strategis seperti penguatan SDM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, swasembada pangan, serta pemberdayaan UMKM dan industri kerajinan. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan. Dokumen perubahan ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
  - n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  - p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - s. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - t. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - v. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

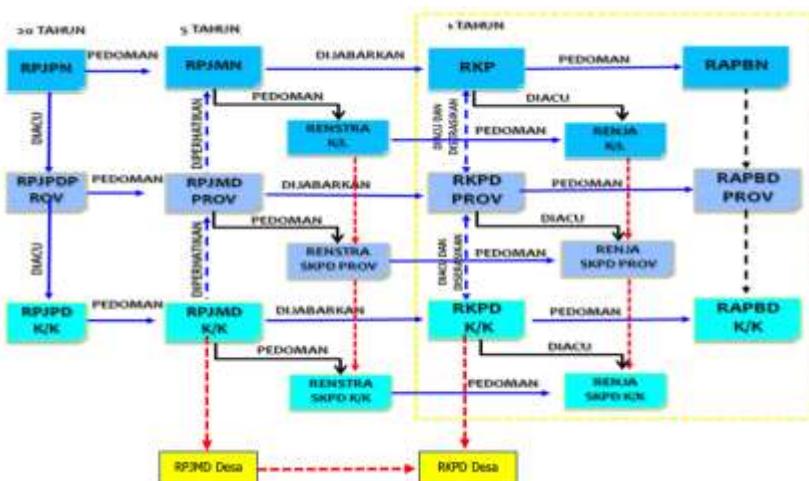
### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Sukoharjo.

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan. Sehingga dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Dan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Perubahan RKP Tahun 2025 menjadi masukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 terkait dengan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target nasional yang selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelarasan dengan strategi, arah kebijakan dan target pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo.

- b. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo dengan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Hal ini terkait dengan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target daerah propinsi yang mengalami perubahan sesuai dengan hasil evaluasi RKPD Propinsi sampai Triwulan I Tahun 2025, termasuk penyesuaian rencana pembangunan kewilayahan yang didalamnya termasuk pengembangan kewilayahan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target daerah propinsi ini selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan penyelarasan dan penyesuaian dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025.

- c. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Dokumen RKPD maupun Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bagian dari penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 merupakan program-program yang berkelanjutan dari RPJMD dijabarkan pada RKPD maupun perubahan RKPD tahun yang direncanakan disesuaikan dengan isu-isu strategis yang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, RPKD maupun perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD yang dilakukan dengan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tahun rencana guna mewujudkan visi “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur” sesuai RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

- d. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan penyesuaian kebijakan dan target sektoral perangkat daerah sebagai hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bapperida untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang kemudian menjadi Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan bupati menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah:

- a. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah secara terintegrasi, serta memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi berbagai sumber daya pembangunan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual;
- b. Melakukan penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan kerangka pendanaan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I Tahun 2025, serta menindaklanjuti arahan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya konsistensi program pembangunan dan sinkronisasi pencapaian target serta sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2026, khususnya untuk Tahun 2025, dengan menyesuaikan arah kebijakan kepala daerah dan program prioritas nasional;
- b. Tersedianya dokumen Perubahan RKPD yang dapat mengakomodasi kebutuhan riil pembangunan di Kabupaten Sukoharjo sesuai perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan kapasitas fiskal, efisiensi belanja, dan potensi pendapatan daerah;
- c. Menyediakan dasar perencanaan yang sah dan operasional untuk penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA dan PPAS-P) serta Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai

landasan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

### **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | : PENDAHULUAN  |
|         | Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika dokumen RKPD.  |
| BAB II  | : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN   |
|         | Memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sampai triwulan pertama tahun berjalan (2025).   |
| BAB III | : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH   |
|         | Memuat penjelasan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.   |
| BAB IV  | : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH   |
|         | Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan 2025 sampai dengan triwulan pertama dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional. |
| BAB V   | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH   |
|         | Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.                               |
| BAB VI  | : PENUTUP  |

## BAB II

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2021-2026 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2. 1 Simbol dan Status Capaian Kinerja**

<b>Simbol</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja Tahunan (PMDN 86/2017)</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja Triwulan I (PMDN 86/2017)</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
● ●	91% ≤ 100%	23% ≤ 25%	Sangat Tinggi
●	76% ≤ 90%	19% ≤ 22,5%	Tinggi
■	66% ≤ 75%	16,5% ≤ 18,5%	Sedang
▼	51% ≤ 65%	13% ≤ 16%	Rendah
▼ ▼	≤ 50%	0%≤ 12,5%	Sangat Rendah

#### **2.1. Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026**

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dilakukan dengan melihat capaian indikator tujuan dan sasaran, sebagaimana berikut:

**Tabel 2. 2 Kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
								Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	$(11) = (10)/(9)*100\%$	(12)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi										
	Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	80,00	72,92	79,00	72,92	93,30	● ●
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,00	85,35	84,00	85,35	101,60	● ●
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,84	4,35	3,80	4,35	114,47	● ●
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	82,00	65,04	80,00	65,04	81,30	●
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,885	1,231	1,758	1,231	70,02	■
				Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III	III	III	III	100	● ●
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	90	97,41	87	97,41	111,96	● ●
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas										
	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,4	78,65	78,23	78,65	100,53	● ●
				Angka Kemiskinan	%	7,0-6,8	7,6-7,4	7,3-7,1	7,6-7,4	95,94	● ●
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,9	77,86	77,85	77,86	100,01	● ●

II-3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
								Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)*100%	(12)
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,39	9,84	9,38	9,84	104,90	● ●
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,86	13,91	13,86	13,91	100,36	● ●
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,86	0,76	0,86	0,76	88,37	●
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,55	97,32	96,54	97,32	100,80	● ●
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	51,66	54,66	49,01	54,66	111,52	● ●
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	35,00	36,00	32,00	36,00	112,50	● ●
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,00	6,45	4,05	6,45	159,25	● ●
				Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,65	0,68	2,70	0,68	100,00	● ●
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi										
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,94-6,28	5,06	5,3-5,94	5,06	95,47	● ●
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,47-4,0	3,4	4,47-4,0	3,4	76,06	●
				Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	49,909	49,88	49,909	49,88	99,95	● ●
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	16,00	19,74	15,00	19,74	131,60	● ●

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
								Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)*100%	(12)
				Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	3,70	1,60	3,60	1,60	44,44	▼ ▼
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,60	5,01	5,40	5,01	92,77	● ●
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	6,40	3,23	6,06	3,23	53,30	▼
				Pertumbuhan investasi	%	28,00	16,13	24	16,13	67,20	■
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	3,10	2,68	3,00	2,68	89,33	● ●
				Skor Pola Pangan Harapan	%	93,90	93,90	93,90	93,90	100,00	● ●
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	85,00	71,72	85,00	71,72	84,37	●
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7656	7.698	7.656	7.698	100,54	● ●
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan										
		Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	74,2	67,69	71,09	67,69	95,21	● ●
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,51	62,03	61,41	62,03	101,00	● ●
				Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	92,00	81,29	92,25	81,29	88,11	●
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	90,81	89	87,76	89	101,41	●
				Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	71,38	69,81	71,24	69,81	97,99	● ●
				Indeks Fatalitas	Angka	0,25	0,062	0,252	0,062	100,00	● ●

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
								Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)*100%	(12)
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100,00	100,00	88,00	100,00	113,63	● ●
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51,5	52,79	51,25	52,79	102,46	● ●
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,25	87,32	87,25	87,32	100,08	● ●
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,1	31,14	31,09	31,14	100,16	● ●
				Indeks Kapasitas Daerah	Nilai	0,50	0,63	0,45	0,63	140,00	● ●
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan										
		Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Keteriban Umum	%	88,50	87,50	88,37	87,50	99,01	● ●
		Meningkatnya kualitas ketentraman dan keteriban masyarakat		Cakupan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,90	69,77	91,88	69,77	75,93	■
		Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara		Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	87,00	70	85,00	70,00	82,35	●
				<b>RATA-RATA</b>						<b>92,83</b>	

Sumber: \*) BPS Kabupaten Sukoharjo.

\*\*) Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Sukoharjo

BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025, data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025 pada Triwulan I, terlihat bahwa sebagian besar sasaran dan program yang terukur menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Sebagai contoh, indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan berbagai indikator di sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur mencapai tingkat capaian 100%. Ini menunjukkan bahwa program-program tersebut berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, mencerminkan efektivitas strategi dan implementasi kebijakan di berbagai sektor. Rata-rata capaian indikator yang tinggi ini, seperti pada program penguatan ideologi Pancasila, pembangunan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, terdapat beberapa indikator yang masih menunjukkan capaian di bawah target optimal, meskipun sebagian besar tetap berada dalam kategori "Tinggi". Misalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 76,06%, sedang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) mencapai 70,02% dalam kondisi sedang, dan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri yang hanya mencapai 53,30% kondisi rendah. Indikator-indikator ini menunjukkan adanya tantangan dalam bidang keuangan daerah dan sektor industri, yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa area yang membutuhkan peningkatan, mayoritas indikator menunjukkan capaian yang sangat baik dengan rata-rata capaian berada di kisaran "Sangat Tinggi". Hal ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan dan implementasi program dalam RPJMD sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun peningkatan di beberapa sektor masih diperlukan untuk memastikan kesuksesan jangka panjang.

## 2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

### 2.2.1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 12 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2025 Triwulan I**

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
Dinas Pendidikan									
1.1	Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80	79,00	75	79,00	100	● ●
1.2	Meningkatnya kualitas dan Akses pendidikan masyarakat	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	82,45	91,62	79,22	91,62	100	● ●
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,97	96,36	99,94	96,36	97	● ●
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 4.1.1.(e)	%	83,12	85,63	82,37	85,63	100	● ●
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 4.1.1.(d)	%	104,16	105,81	105,44	105,81	100	● ●
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 4.1.1.(e)	%	104	111,10	105,03	111,10	100	● ●
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	● ●
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	● ●
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	102,08	100	102,08	100	● ●
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	113,83	100	113,83	100	● ●
		Capaian SPM Pendidikan	%	100	100	96,9	100	100	● ●
1.3	Meningkatnya profesionalisme Pendidik	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	100	95,49	98,87	95,49	96,58	● ●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>99,55</b>	
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5- 15 dalam Satuan pendidikan	%	97,72	84,97	96,82	84,97	87,76	● ●
1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN	Persentase pemenuhan pendidik	%	85,00	75,00	80,00	75,00	93,75	● ●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
	TENAGA KEPENDIDIKAN	dan tenaga kependidikan							
	<b>RATA-RATA</b>							<b>97,17</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap status capaian indikator Dinas Pendidikan hingga tahun 2025 Triwulan I, secara keseluruhan, capaian kinerja dapat dinilai sangat tinggi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100 % untuk sasaran Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik, serta 95,52% untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang sudah mencapai atau melampaui target renstra 2021-2026, seperti nilai SAKIP perangkat daerah, tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD, serta angka partisipasi kasar (APK) dan angka kelulusan (AL) di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Namun, terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian di bawah target renstra yang perlu mendapat perhatian, seperti persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV yang baru mencapai 95,58%, serta angka partisipasi murni (APM) di jenjang SD/MI yang belum mencapai target renstra, sebesar 97,00%. Meskipun demikian, dengan capaian rata-rata yang tinggi, status capaian kinerja keseluruhan masih dikategorikan sangat tinggi sesuai dengan kriteria penilaian yang diberikan, dengan mayoritas indikator mencapai nilai realisasi kinerja di atas 91%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pendidikan di daerah ini secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan terdiri dari 9 indikator kinerja sasaran dan 32 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2025 Triwulan I**

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
<b>Dinas Kesehatan</b>									
	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	94	127,58	93	1 Kasus	100,00	● ●
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000	Per 1000 Kelahiran	7,1	11,13	7,0	21 Kasus	100,00	● ●

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
		kelahiran hidup.	Hidup						
		Angka Kematiian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	8,3	12,29	8,2	21 Kasus	100,00	● ●
		Persentase Stunting	%	7,6	9,5	7,55	8,8	83,44	● ●
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	129,2	100	100	100,00	● ●
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	69	86,5	87	22,4	25,74	▼ ▼
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	45	70,5	73,6	73,6	100,00	● ●
Rumah Sakit Umum Daerah									
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Nett Death Rate (NDR)	permil	35	35,96	30	33,40	100,00	● ●
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	77	78	77	NA	NA	
	<b>RATA-RATA</b>							<b>90,16</b>	
Dinas Kesehatan									
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.2.3		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	32,00	73,9	73,9	77,30	100	● ●
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan	%	78,00	62,1	86,00	64,30	74,77	■

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
		Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi							
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	80,00	60,00	100,00	60,00	60,00	▼
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	52,00	42,26	52,00	58,00	85,12	●
		Persentase Capaian UHC	%	95,00	98,46	98,6	98,36	99,75	● ●
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Puskesmas dengan cakupan kesehatan pada kesehatan reproduksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Puskesmas dengan cakupan kesehatan pada lansia	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	89,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼ ▼
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	85,00	88,56	86,00	89,67	100,00	● ●
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	35,00	35,96	30,00	33,40	100,00	● ●
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	86,00	86,09	91,00	86,25	94,78	● ●
1.2.5	PROGRAM PEMBERTERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	48,00	63,47	65,00	63,47	97,64	● ●
00:00:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼ ▼
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	100,00	100,00	100,00	25,20	25,20	▼ ▼
<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>									
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase Kepuasan	%	85,00	88,56	85,00	88,45	100,00	● ●

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelanggan Rumah Sakit							
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	35,00	35,96	30,00	34,41	100,00	● ●
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100,00	100,00	100,00	7,00	7,00	▼ ▼
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	100,00	100,00	100,00	25,20	25,20	▼ ▼
<b>RATA-RATA</b>								84,40	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Analisis terhadap status capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menunjukkan bahwa sebagian besar program telah mencapai hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja yang sangat tinggi ( $90,16\% \leq 100\%$ ). Misalnya, indikator seperti, Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular menunjukkan capaian 100% hingga triwulan I tahun 2025. Hal ini mencerminkan upaya yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bahkan, indikator penting lainnya seperti persentase fasilitas kesehatan yang memberikan layanan JKN, kepuasan pelanggan RSUD, dan akreditasi rumah sakit paripurna juga menunjukkan capaian yang optimal.

Namun, ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya pada indikator yang berada dalam kategori tinggi hingga rendah. Contohnya, ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa hanya mencapai 25,74%, yang masuk kategori rendah. Selain itu, persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan yang berijin sesuai ketentuan juga perlu ditingkatkan karena capaiannya yang belum optimal. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja berada di angka 94,78%, yang menunjukkan bahwa meskipun banyak indikator yang menunjukkan hasil yang sangat tinggi, ada beberapa aspek penting

yang masih memerlukan peningkatan agar seluruh target dapat tercapai secara maksimal.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 9 indikator kinerja sasaran dan 32 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur publik,sarana dan prasarana dasar masyarakat	Akses air minum yang layak	%	100,00	93,64	100,00	93,64	93,64	● ●
		Akses layanan Sanitasi	%	100,00	98,35	100,00	98,35	98,35	● ●
		Rasio Jaringan Irigasi	%	55,00	58,79	55,00	58,79	106,89	● ●
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8,54	6,64	8,05	6,64	82,48	●
		Rasio bangunan sesuai ketentuan	%	27,78	26,66	27,4	26,66	97,29	● ●
		Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	88,4	89,36	88,35	89,36	101,14	● ●
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	70,00	62,5	70,00	62,5	89,28	● ●
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	78,00	62,31	76,00	62,31	81,98	●
	RATA-RATA							93,88	
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	%	94,58	80,27	70,93	80,27	113,16	● ●
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	%	96,08	1,41	2,32	1,41	60,77	▼
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	%	27,78	26,66	27,4	26,66	97,29	● ●
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/	%	8,54	6,64	8,06	6,64	82,38	●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
		pembuangan aliran air tidak tersumbat							
1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap	%	45,47	35,05	40,63	35,05	86,26	● ●
1.3.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	prosentase Daerah irigasi yang baik	%	55,00	58,79	53,00	58,79	110,92	● ●
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	88,40	89,36	88,35	89,36	101,14	● ●
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang	%	70,00	65,00	70,00	65,00	92,85	● ●
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	74,71	76,00	74,71	98,30	● ●
	RATA-RATA							94,30	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja pada bidang infrastruktur publik, sarana, dan prasarana dasar masyarakat, serta perencanaan dan pemanfaatan ruang, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Mayoritas indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan persentase antara 91% hingga 100%. Misalnya, akses air minum layak, layanan sanitasi, rasio jaringan irigasi, dan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap semuanya menunjukkan pencapaian yang optimal. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan dan implementasi program yang efektif di bidang ini. Selain itu, ketepatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, mencapai 92,85%, yang mengindikasikan kualitas perencanaan yang baik.

Namun, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih, seperti persentase drainase dalam kondisi baik yang hanya mencapai 82,38%, masuk dalam kategori tinggi namun belum optimal. Nilai SAKIP perangkat daerah sudah mencapai 98,30%, berada dalam kategori sangat tinggi, menunjukkan masih ada ruang sekitar 1,70% untuk perbaikan dalam hal kualitas aparatur dan pelayanan publik. Terlebih lagi, program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air

Limbah menunjukkan capaian kategori rendah sekitar 60,77%, yang perlu segera diperhatikan agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target keseluruhan. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator mencapai 94,30%, mengindikasikan kinerja yang baik dengan beberapa area yang memerlukan peningkatan lebih lanjut.

#### 4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdiri dari 5 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPM Perumahan Rakyat	Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.2	Meningkatnya RTLH menjadi RLH	Prosentase pemenuhan rumah yang layak	%	22.70	48,86	35,60	48,86	137,24	● ●
1.3	Meningkatnya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	20,02	53,09	33,35	53,09	159,19	● ●
1.4	Meningkatnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan baik	Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dan Tertangani dengan baik	%	90,00	88,22	84,12	88,22	104,87	● ●
1.5	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,00	63,08	75,00	63,08	84,10	●
<b>RATA-RATA</b>								<b>117,08</b>	
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog)	%	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	● ●
1.4.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase penurunan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	32,00	14,46	32,00	14,46	48,20	▼ ▼
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	prosentasi PSU yang sudah	%	100,00	320,00	100,00	320,00	320,00	● ●

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	diserahkan ke Pemerintah Daerah							
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>128,03</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja di sektor perumahan dan permukiman, beberapa program memiliki capaian kinerja sangat tinggi. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, seperti peningkatan cakupan pelayanan SPM Perumahan Rakyat, pemenuhan rumah layak huni (RTLH), dan penanganan perumahan kumuh serta permukiman kumuh, di mana semua indikator ini mencapai 100% dan diatas 100%. Selain itu, program penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang diserahkan kepada pemerintah daerah juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat capaian 320%. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak serta pengelolaan PSU yang optimal.

Namun, ada indikator kinerja yang menunjukkan hasil yang sangat rendah, yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu pada Program Kawasan Permukiman. Program yang bertujuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni serta pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog) mencapai 100%, yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Selain itu, penurunan luas permukiman kumuh berada pada tingkat capaian yang sangat rendah, yaitu di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan di beberapa area, masih terdapat tantangan besar dalam penanganan perumahan kumuh dan backlog perumahan. Rata-rata capaian keseluruhan mencapai 128,03%, ini menandakan keseriusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.

## 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 7 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 Triwulan I**

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan per UU daerah, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta meningkatnya kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah	%	97,7	96,96	97,6	96,96	99,34	● ●
		Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	%	98,6	90,37	91,88	90,37	98,35	● ●
		Persentase anggota Satlinmas terlatih	%	62,00	58,00	60,00	58,00	96,66	● ●
		Persentase Tanggap Kebakaran (Respon Time)	%	95,7	95,5	95,6	95,5	99,89	● ●
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	81,00	74,82	75,00	74,82	99,76	● ●
1.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	%	95,00	64,18	94,00	64,18	100,00	● ●
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	70,00	73,22	65,00	73,22	112,00	● ●
<b>RATA-RATA</b>								<b>100,85</b>	
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>									
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	97,70	96,96	97,60	96,96	99,34	● ●
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98,60	98,40	98,51	98,40	99,88	● ●
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	95,70	95,50	95,60	95,50	99,89	● ●

	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN AN NON KEBAKARAN								
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian penanggulangan bencana	%	100,00	97,70	100,00	97,70	97,70	● ●
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	88,95	100,00	88,95	88,95	●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>97,96</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja dalam penegakan ketertiban umum, mitigasi bencana, dan pelayanan publik, terlihat adanya hasil yang beragam. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, seperti penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum, yang masing-masing mencapai lebih dari 94% hingga 100%. Selain itu, cakupan mitigasi bencana dan pelatihan anggota Satlinmas juga menunjukkan capaian maksimal dengan tingkat pencapaian hingga 100%. Indikator-indikator ini menunjukkan efektivitas dalam penanganan tugas-tugas terkait ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana, yang merupakan hasil dari upaya yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang berada pada tingkat capaian yang sangat rendah, yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya, **cakupan pelayanan bencana kebakaran menunjukkan capaian sekitar 99,89%** dan **program penanggulangan bencana menunjukkan capaian sekitar 97,70%**, yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Selain itu, persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan tinggi, baik di Satuan Polisi Pamong Praja maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tingkat pencapaian rata-rata sekitar **97,96%**. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan signifikan dalam beberapa area, masih terdapat kelemahan yang perlu segera diatasi, terutama dalam hal penanganan bencana dan efisiensi pelaksanaan program pemerintahan, untuk memastikan semua target Rencana Strategis 2021-2026 dapat tercapai dengan baik. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator mencapai **97,96%**, mengindikasikan adanya adanya kenaikan signifikan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

## 6. Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Tar get	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	13,31	23,28	14,31	0,77	5,38	▼ ▼
1.2	Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		73,52	77,84	86,47	73,98	85,55	● ●
1.3	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100	100	100	100	100,00	● ●
		Jumlah taman makam pahlawan dalam kondisi baik		1	1	1	1	100,00	● ●
1.4	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	67,55	NA	72,92	NA	100,00	● ●
<b>RATA-RATA</b>								<b>78,19</b>	
1.6.20 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	5,13	5,12	5,63	0,66	11,72	▼ ▼
1.6.20 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
01:06: 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	%	73,91	73,91	73,91	17,19	23,25	▼ ▼
1.6.20 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	17,99	17,48	19,04	21,07	100,00	● ●
1.6.20 02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	73,52	77,84	86,47	73,98	85,55	●

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satu an</b>	<b>Targe t Renstra 2024</b>	<b>Realis asi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Targ et</b>	<b>Realis asi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.6.2007	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
0.0.1	PRROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	10,21	10,21	▼ ▼
<b>RATA-RATA</b>								<b>61,52</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Analisis terhadap capaian indikator kinerja dalam sektor kesejahteraan sosial menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja, seperti penanganan dan peningkatan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan capaian yang sangat rendah, dengan persentase jauh di bawah target. Persentase PMKS yang tertangani hanya mencapai 5,38%, dan Prosesntase pemenuhan penaganan bencana juga hanya mencapai 23,25%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara target yang direncanakan dan realisasi di lapangan, yang memerlukan intervensi mendesak untuk meningkatkan efektivitas program-program yang ada.

Di sisi lain, beberapa indikator kinerja seperti pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD) menunjukkan capaian yang sangat tinggi, mencapai 100%. Ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam beberapa area spesifik yang dikelola dengan baik. Namun, rata-rata keseluruhan capaian indikator berada pada angka 61,52%, yang berada dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa keberhasilan, secara umum masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan rehabilitasi sosial. Untuk mencapai target Renstra 2021-2026, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terfokus dalam meningkatkan capaian di sektor-sektor yang tertinggal ini.

## 2.2.2.Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dari 2 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Targe t</b>	<b>Realissa si sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	angka	20.500	18.631	20.909	18.631	89,10	●
1.2	Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan public	Capaian Nilai SAKIP	poin	81,05	62,03	79,05	62,03	78,4	●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>83,78</b>	
2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase akurasi proyeksi indikator dalam RTK	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	● ●
2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,48	0,11	0,45	0,11	24,44	▼ ▼
2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	prosentase tenaga kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	83,00	63,00	83,00	63,00	75,90	■
	<b>RATA-RATA</b>							<b>66,78</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Analisis terhadap capaian indikator kinerja dalam upaya menurunkan pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas aparatur serta pelayanan publik menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh masih berada di bawah target yang diharapkan. Indikator angka pengangguran terbuka berhasil mencapai 89,10%, yang tergolong tinggi namun belum mencapai target optimal. Namun, capaian nilai SAKIP yang hanya mencapai 78,4% berada dalam kategori tinggi, yang menunjukkan adanya peluang besar dalam peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik. Rata-rata capaian keseluruhan mencapai 83,78%, yang masuk dalam kategori tinggi, mengindikasikan perlunya mempertahankan dan perbaikan dalam implementasi program-program yang telah direncanakan.

Sementara itu, dalam program perencanaan tenaga kerja, akurasi proyeksi indikator menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100%. Namun, program pelatihan dan penempatan tenaga kerja menunjukkan hasil yang jauh dari target. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi hanya mencapai 24,44%, dan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja hanya mencapai 75,90%, keduanya masuk dalam kategori belum mencapai target. Rata-

rata capaian pada program-program ini hanya sebesar 66,78%, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan penempatan tenaga kerja memerlukan perhatian khusus dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target Renstra 2021-2026. Secara keseluruhan, capaian indikator di sektor ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi, yang memerlukan evaluasi dan perbaikan mendalam.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 8 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

**Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	76,37	<b>79,28</b>	<b>79,16</b>	<b>79,28</b>	<b>100,00</b>	● ●
1.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap anak	Rasio	1:8525	<b>1:4988</b>	<b>1:6100</b>	<b>1:23279</b>	<b>26,20</b>	▼ ▼
		Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	1:10410	<b>1: 9150</b>	<b>1:11150</b>	<b>1:31372</b>	<b>35,54</b>	▼ ▼
	RATA-RATA							<b>69,42</b>	
2.8.2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	%	50,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	100,00	● ●
2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%	100,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	● ●
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	<b>100</b>	<b>100,00</b>	● ●
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	%	0,18	0,17	0,17	<b>0,17</b>	<b>100,00</b>	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	nilai	750,00	620,40	725,00	620,40	85,57	●
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	● ●
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	%	50,00	35,00	35,00	35	100,00	● ●
	RATA-RATA							97,94	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Analisis terhadap capaian indikator kinerja dalam bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk menunjukkan hasil yang sangat positif. Secara keseluruhan, mayoritas indikator mencapai hasil yang sangat tinggi, dengan tingkat pencapaian di atas 80% hingga 100%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melampaui target yang ditetapkan, dan rasio kekerasan terhadap anak serta perempuan berhasil ditekan hingga ke kategori sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam program perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan juga menunjukkan hasil yang optimal dengan semua indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, termasuk responsif gender lembaga dan ketersediaan data serta informasi terkait PPPA.

Namun, meskipun rata-rata capaian berada pada tingkat yang sangat tinggi (97,94%), ada beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Program pemenuhan hak anak (PHA), misalnya, menunjukkan skor Kabupaten Layak Anak yang berada di angka 85,57%, masuk dalam kategori tinggi tetapi belum mencapai hasil optimal. Angka yang belum optimal ini sebenarnya bukanlah angka final, mengingat skor Kabupaten Layak Anak dikeluarkan tahunan, jadi tidak bisa hanya dalam penilaian Triwulan I saja.

### 3. Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dari 7 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran/Pro gram	Indikator Kinerja	Satu an	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Tingkat Konsumsi Energi (Kalori)	%	98,4	93,65	98,4	93,65	95,17	● ●
		Tingkat Konsumsi Protein	%	99,82	99,65	99,82	99,65	99,82	● ●
		Penguatan Cadangan Pangan	%	31	30	31	30	96,77	● ●
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	3,59	4,79	3,59	4,79	100,00	● ●
		Ketersediaan Bidang Pangan utama	%	226,9	278,01	226,9	278,01	100,00	● ●
		Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	%	91,11	90	94	90	95,74	● ●
1.2	Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80	67,62	80	67,62	84,52	●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>96,00</b>	
2.9. 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	%	13,17	13,77	13,17	13,77	100	● ●
2.9. 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	%	127,91	137,04	127,91	137,04	100	● ●
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	%	5,90	3,19	5,9	3,19	54,06	▼
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Bawang Merah	%	20,90	12,66	20,9	12,66	60,57	▼
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Cabe	%	46,10	22,21	46,1	22,21	48,17	▼ ▼
2.9. 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANA N PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	%	75,00	62,50	75	62,50	83,33	● ●
2.9. 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	%	43,75	37,50	43,75	37,50	85,71	● ●

Ko de	Sasaran/Pro gram	Indikator Kinerja	Satu an	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
0.0. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH HAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>78,98</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja terkait ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas serta kapasitas aparatur dan pelayanan publik, terlihat bahwa sebagian besar program menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Indikator seperti tingkat konsumsi energi (kalori), konsumsi protein, penanganan daerah rawan pangan, dan ketersediaan pangan utama menunjukkan capaian yang sangat tinggi, mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa program-program ini berhasil dijalankan dengan baik, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang berkualitas. Selain itu, nilai SAKIP perangkat daerah yang mencapai 84,52% menunjukkan adanya kondisi pelayanan yang signifikan dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang merupakan indikasi positif bagi keberhasilan program peningkatan kapasitas aparatur.

Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian yang rendah hingga sangat rendah, yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Misalnya, koefisien variasi harga pangan strategis seperti telur, bawang merah, dan cabai menunjukkan ketidakstabilan harga yang cukup signifikan, dengan capaian hanya 54,06%, 60,57%, dan 48,17%. Ketidakstabilan harga ini dapat mempengaruhi aksesibilitas dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, yang berpotensi berdampak negatif pada ketahanan pangan secara keseluruhan. Rata-rata capaian indikator di angka 78,98%, terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di beberapa area, khususnya yang terkait dengan stabilitas harga pangan dan mempertahankan efektivitas administrasi pemerintahan, guna memastikan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 dapat tercapai sepenuhnya.

#### 4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dari 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran/Pro gram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisa si Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
02: 10: 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase penanganan sengketa tanah garapan	%	76,00	46,00	60,00	46,00	76,66	●
2.1 0.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	prosentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	93,00	67,00	80,00	67,00	83,75	●
2.1 0.1 0	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	%	93,00	57,00	75,00	57,00	76,00	●
0.0. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
	RATA-RATA							84,10	●

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja dalam program terkait penanganan sengketa tanah dan penatagunaan tanah, terdapat variasi dalam tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan. Program penyelesaian sengketa tanah garapan menunjukkan capaian yang tergolong tinggi dengan persentase 76,66%. Ini menandakan bahwa meskipun ada progres, target optimal belum sepenuhnya tercapai, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan sengketa tanah. Di sisi lain, program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah serta penatagunaan tanah menunjukkan capaian yang tinggi, masing-masing sebesar 83,75% dan 76%. Kedua program ini berada dalam kategori "tinggi," mencerminkan bahwa proses penanganan dan perencanaan sudah berada di jalur yang benar, meskipun masih ada sedikit ruang untuk perbaikan agar dapat mencapai target maksimal.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah menampilkan hasil yang sangat tinggi, dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan adanya usaha yang signifikan dalam pelaksanaan dukungan administratif atau operasional, yang bisa berdampak positif pada efektivitas program-program lainnya. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja berada pada angka 84,10%, yang masuk dalam kategori tinggi. Ini menandakan pencapaian positif, yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal penataagunaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah, untuk memastikan semua program

berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.

## 5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dari 4 indikator kinerja sasaran dan 12 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
1.1	Meningkatnya standar kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Prosentase Peningkata n Pengelolaa n Lingkunga n Hidup (LH)	%	75,00	68,00	70,00	68,00	97,14	● ●
		Prosentase timbunan sampah yang dikelola (LH)	%	100,00	77,07	99,00	77,07	77,84	●
		Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawa san perkotaan (LH)	%	39,00	39,00	38,63	39,00	100,95	● ●
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angk a	65,00	66,14	64,00	66,14	103,34	● ●
<b>RATA- RATA</b>								<b>94,81</b>	
2.1 1.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase ketersediaa n dokumen perencanaaa n lingkungan hidup	%	100,00	70,00	83,00	70,00	84,34	●
2.1 1.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengendali an pencemara n dan kerusakan pada sumber pencemara n dan perusakan lingkungan	%	100,00	80,00	100,00	80,00	80,00	●
		Prosentase wilayah yang memiliki	%	31,00	29,00	30,00	29,00	96,67	● ●

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
		kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim							
2.1 1.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	2161,48	2161,48	2161,48	2161,48	100,00	● ●
2.1 1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase ketataan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten	%	100,00	106,67	100,00	106,67	106,67	● ●
2.1 1.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	%	100,00	124,88	100	124,88	124,88	● ●
2.1 1.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase penyelenggaraan pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	%	100,00	62,00	81,00	62,00	76,54	●
2.1 1.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	%	100,00	60,00	80,00	60,00	75,00	■
2.1 1.1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100,00	116,7	100,00	116,7	116,70	● ●
2.1 1.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah	%	70,00	62,90	70,00	62,90	89,86	●
		Prosentase pengurangan sampah	%	30,00	16,08	30,00	16,08	53,60	▼

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
0.0 .1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah kabupaten /kota	%	97,00	100,00	97,00	100,00	103,09	● ●
<b>RATA-RATA</b>								<b>92,28</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja dalam bidang lingkungan hidup dan pelayanan publik, terlihat bahwa beberapa program berhasil mencapai hasil yang sangat memuaskan. Misalnya, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), program penanganan pengaduan lingkungan hidup , program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) mencapai capaian yang sangat tinggi, bahkan hingga 100%. Nilai SAKIP perangkat daerah juga menunjukkan hasil yang optimal, dengan capaian 100%, mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Ini mencerminkan keberhasilan dalam beberapa aspek pengelolaan lingkungan hidup dan administrasi publik yang telah direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara efektif.

Namun, ada beberapa indikator yang menunjukkan capaian yang sangat rendah, yang memerlukan perhatian khusus. Program Pengelolaan Persampahan pada pengurangan sampah, misalnya, hanya mencapai 53,60%, yang masuk dalam kategori sangat rendah. Disamping itu masih ada capaian kinerja program dalam kategori sedang yaitu Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota sudah mencapai 103,09%, yang menandakan adanya peningkatan signifikan dalam pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional. Dengan rata-rata capaian indikator di angka 92,28%, yang termasuk kategori rendah, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi mendalam dan penyesuaian strategi guna memastikan bahwa seluruh program dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Upaya perbaikan ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program yang masih tertinggal, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## 6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dari 4 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Adminduk	nilai	85,00	89,17	84,00	89,17	100,00	● ●
1.1	Meningkatnya Kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	85,00	79,52	80,00	79,52	99,40	● ●
1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase terlayaninya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	j	0,5	12	1	12	100,00	● ●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>100</b>	
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>100,00</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan, hasil menunjukkan bahwa

hampir semua program yang dijalankan berhasil mencapai target yang sangat tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan administrasi kependudukan mencapai 100% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Selain itu, cakupan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil juga tercapai sepenuhnya, dengan semua pemohon dokumen mendapatkan layanan yang diharapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, indikator lain seperti nilai SAKIP perangkat daerah dan validitas data kependudukan juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, masing-masing mencapai lebih dari 99,40 %. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator mencapai 100%, yang berarti program-program yang dijalankan berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi yang dilakukan telah berjalan dengan sangat baik, memberikan dampak positif pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Dengan mempertahankan kualitas ini, layanan administrasi kependudukan diharapkan terus memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dari 4 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 Triwulan I**

Kod e	Sasaran/Pro gram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisa si Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.3	Meningkatny a Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	ang ka	80,00	72,68	80	72,68	91,00	● ●
1.4	Meningkatny a Desa Maju	Persentase Berdirinya Bumdes	%	100,00	96,67	100	99,33	99,00	● ●
		Persentase Desa Mandiri	%	30,66	40,67	28	40,67	100,00	● ●
1.5	Meningkatny a Kinerja Pemerintaha n Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina	%	100,00	81,82	100	81,82	82,00	●
<b>RATA-RATA</b>								<b>95,61</b>	
0.0. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Kegiatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼ ▼

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
2.1 3.2	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼ ▼
2.1 3.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DESA	%	12,67	8,67	10,67	8,67	81,00	●
2.1 3.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan/Dibina	%	100,00	83,33	100,00	83,33	83,00	●
<b>RATA-RATA</b>								<b>45,70</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja yang terkait dengan peningkatan kualitas aparatur, pelayanan publik, dan pengembangan desa, terlihat adanya variasi dalam tingkat pencapaian target. Beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, seperti persentase berdirinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mencapai 99 %, yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Nilai SAKIP perangkat daerah juga menunjukkan capaian yang hampir optimal di angka 91%. Namun, persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina mencapai 82%, yang berada dalam kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat kelemahan dalam pembinaan aparatur desa yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, program-program terkait penunjang urusan pemerintahan daerah dan penataan desa menunjukkan capaian yang sangat rendah. Misalnya, persentase kegiatan pelayanan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penataan desa masing-masing hanya mencapai 25%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan capaian hanya 100%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator untuk program-program ini hanya mencapai 45,70%, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam hal kolaborasi desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa target telah tercapai, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan seluruh sasaran Renstra 2021-2026 dapat terwujud secara merata dan efektif.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari 4 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

**Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran /Progra m	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 1	Menuru nnya Angka Kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,84	1,33	1,67	1,33	79,64	●
		Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	%	4,85	3,40	4,70	3,40	72,34	■
2. 2	Meningk atnya pendew asaan usia perkawi nan (PUP)	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Um ur	23,00	22,80	22,00	22,80	100,00	● ●
2. 3	Meningk atnya Kualitas Aparatu r dan Pelayan an Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	ang ka	79,00	72,72	64,58	72,72	100,00	● ●
	<b>RATA- RATA</b>							87,99	
2. 14 .2	PROGR AM PENGE NDALIA N PENDU DUK	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	%	50,00	30,00	35,00	35,00	100,00	● ●
2. 14 .3	PROGR AM PEMBIN AAN KELUAR GA BEREN CANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	70,00	67,57	63,89	67,57	100,00	● ●
2. 14 .4	PROGR AM PEMBE RDAYAA N DAN PENING KATAN KELUAR GA SEJAHT ERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	%	80,00	78,00	78,00	78,00	100,00	● ●
0. 0. 1	PROGR AM PENUNJ ANG	Persentase pelaksanaan penunjang urusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	24,00	▼ ▼

Ko de	Sasaran /Progra m	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSA N PEMERI NTAHAN DAERA H	pemerintah daerah								
RATA-RATA								81,00	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dalam program pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas aparatur serta pelayanan publik, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata capaian mencapai 81% hingga 87,99%. Salah satu indikator utama yaitu rata-rata usia kawin pertama wanita menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yakni 100%. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan telah berhasil secara signifikan. Selain itu, nilai SAKIP perangkat daerah yang mencapai 100% juga mencerminkan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik yang optimal.

Namun, ada satu indikator yang memerlukan perhatian lebih, yaitu Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah termasuk dalam kategori sangat rendah (24%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Akan tetapi, mengingat capaian ini masih berada di Triwulan I, maka akan sangat terbuka kesempatan bagi DPPKBP3A untuk dapat memenuhi Target Renstra hingga akhir tahun 2025 (Triwulan IV).

## 9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dari 3 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran/Pr ogram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Meningkatn ya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0,5	0,03	0,293	0,25	86,20	●
1.2	Meningkatn ya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	24,00	16,90	24,5	21,60	88,16	●
1.3	Meningkatn ya kualitas aparatur dan	Nilai SAKIP PD	nilai	79,00	75,86	77,00	75,86	98,52	● ●

Ko de	Sasaran/Pr ogram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelayanan publik								
	RATA-RATA							90,96	
2.1 5.2	PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	%	71,80	73,58	71,50	73,58	102,90	● ●
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	11,98	10,76	11,49	11,49	100	● ●
02: 15: 03	PROGRAM PENGELOL AAN PELAYARA N	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	▼ ▼
2.1 5.5	PROGRAM PENGELOL AAN PERKERET APIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	%	100,00	100	100	100	100	● ●
2.1 5.2	PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	86,00	84,3	85	85	100	● ●
0.0. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	75,86	77	75,86	95,51	● ●
	RATA-RATA							83,06	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja dalam program transportasi, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara beberapa aspek. Indikator-indikator terkait kinerja sarana dan prasarana transportasi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan capaian angka kecelakaan sarana dan prasarana transportasi masing-masing mencapai 88,16% dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi telah berhasil secara signifikan. Selain itu, cakupan wilayah yang terkoneksi dengan angkutan umum juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu 100%, menandakan adanya peningkatan aksesibilitas angkutan umum. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 98,52%, masuk dalam kategori sangat tinggi, tetapi masih di bawah target optimal yang diharapkan.

Di sisi lain, ada indikator menunjukkan capaian yang sangat rendah dan memerlukan perhatian khusus. Program pengelolaan pelayaran, misalnya, menunjukkan capaian yang sangat rendah, dengan capaian kinerja hanya mencapai 0% dari target yang ditetapkan. Hal ini

disebabkan karena mulai tahun 2023 Penyeberangan sungai di Beton sudah ditutup sehingga tidak ada lagi penyeberangan sungai yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah sudah mencapai 95,51%. Rata-rata capaian keseluruhan indikator di sektor ini mencapai 90,96%, yang berada dalam kategori tinggi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada keberhasilan di beberapa area, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi, terutama dalam hal pengelolaan layanan transportasi dan implementasi program penunjang pemerintahan. Perlu adanya evaluasi menyeluruh dan strategi perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh program dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

## 10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dari 6 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingka t Capaia n Renstr a s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,00	65,00	78,00	65,00	83,33	●
1.4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Indek KAMI	nilai	500,00	350,00	450,00	350,00	77,77	●
1.5	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Prosentase /cakupan data statistik sektoral	%	100,00	94,23	95,59	94,23	98,58	● ●
1.2	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	nilai	96,00	98,43	95,00	98,43	103,61	● ●
1.3	Meningkatnya kualitas Layanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3,95	4,82	3,92	4,82	122,95	● ●
2.1	Cakupan Infrastruktur TI	Cakupan Infrastruktur TI	%	100,00	100,00	88,00	100,00	113,64	● ●
<b>RATA-RATA</b>								<b>99,98</b>	
0.0 .1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan	%	100,00	96,60	100,00	96,60	96,60	● ●

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingka t Capaia n Renstr a s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemerintah daerah							
2.1 6.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Badan Publik Terbuka	%	75,00	57,00	65,00	57,00	87,69	●
2.1 6.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	%	100,00	66,00	95,00	66,00	69,47	■
2.1 6.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Percentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	88,00	99,29	112,82	● ●
RATA-RATA								91,64	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja, terlihat bahwa upaya peningkatan kualitas aparatur, pelayanan publik, dan infrastruktur teknologi informasi (TI) menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebagian besar indikator utama berhasil mencapai target yang tinggi dan sangat tinggi, seperti Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai 103,61%, Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 122,95%, serta cakupan infrastruktur TI mencapai 113,64%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan transparansi, kualitas layanan berbasis elektronik, dan infrastruktur TI yang memadai. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator di area ini mencapai 99,98%, yang mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut.

Namun, terdapat indikator yang menunjukkan capaian yang sedang dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satunya adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Prosentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, yang mencapai 69,47%, masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam dukungan administratif dan operasional yang bisa mempengaruhi kelancaran implementasi program lainnya. Selain itu, capaian dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika masih berada di kategori sedang sebesar 69,47%, dengan persentase 73,33%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator untuk program-program ini mencapai 91,64%, yang mengindikasikan bahwa meskipun beberapa program berjalan dengan baik, ada beberapa area yang memerlukan peningkatan signifikan untuk mencapai target

yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Perlu adanya upaya yang lebih fokus dalam memperkuat aspek pendukung dan memastikan bahwa seluruh program dapat diimplementasikan secara optimal.

## 11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dari 4 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi aktif	%	84,50	42,20	84,00	42,20	50,23	▼ ▼
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30,00	22,00	25,00	22,00	88,00	●
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,64	99,75	99,63	99,75	100,00	● ●
1.2	Meningkatnya Wira Usaha Baru	Presentase Wirausaha Baru yang mempunyai NIB	%	5,51	9,57	4,69	9,57	100,00	● ●
	RATA-RATA							79,41	
2.17 .2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
2.17 .3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	84,50	42,20	84,00	42,20	50,23	▼ ▼
2.17 .5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	82,00	26,37	80	26,37	32,96	▼ ▼
2.17 .4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai Kesehatannya	%	30,00	22,00	25,00	22,00	88,00	●
2.17 .8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	30,00	28,82	29,00	28,82	99,37	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17 .7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM	%	30,00	35,45	29,00	35,45	100,00	● ●
		Persentase kemitraan KUMKM	%	8,18	7,42	7,70	4,42	57,40	▼
2.17 .6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	6,00	8,78	5,50	6,00	100,00	● ●
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA	Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	%	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
	RATA-RATA							80,88	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja terkait peningkatan kualitas koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan wirausaha baru, terlihat bahwa sebagian indikator menunjukkan pencapaian yang baik, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan perbaikan signifikan.

Persentase koperasi aktif perlu upaya sungguh-sungguh dalam pencapaian realisasinya, namun, wirausaha baru yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan tingkat realisasi mencapai 100%. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam meningkatkan jumlah wirausaha baru dan kualitas usaha kecil. Rata-rata capaian pada sasaran ini mencapai 79,41%, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik secara keseluruhan, meskipun ada beberapa indikator yang masih perlu diperhatikan.

Namun, terdapat beberapa program yang masih menunjukkan capaian yang sangat rendah dan memerlukan perhatian khusus. Misalnya, Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan mencapai 32,96%, dan Persentase kemitraan KUMKM di angka 57,4%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan koperasi berjalan dengan sehat dan dikelola dengan baik. Selain itu, program-program pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi juga menunjukkan capaian yang jauh dari target, yang mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih intensif dan terarah. Rata-rata capaian keseluruhan untuk program-program ini hanya mencapai 80,88%, yang masuk dalam kategori sedang, mengindikasikan bahwa meskipun ada keberhasilan di beberapa area,

masih ada ruang yang cukup besar untuk peningkatan, terutama dalam hal pengelolaan dan pengawasan koperasi serta pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi.

## 12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dari 4 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)* 100%	(10)
1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	nilai	85,00	85,79	85,00	85,79	100,00	● ●
2	Tercapainya Pertumbuhan Investasi	Pertumbuhan investasi	%	28,00	57,00	24,00	57,00	100,00	● ●
2.1	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	%	100,00	104,79	90,00	104,79	100,00	● ●
2.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	81,00	63,15	76	63,15	83,00	●
	RATA-RATA							95,75	
2.18. 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	%	100,00	81,25	100,00	15,00	15,00	▼ ▼
		Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	%	100,00	81,25	100,00	15,00	15,00	▼ ▼
		Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal	%	100,00	81,25	100,00	15,00	15,00	▼ ▼
2.18. 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
2.18. 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)* 100%	(10)
		Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
2.18. 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼ ▼
2.18. 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	100,00	81,64	100,00	8,00	8,00	▼ ▼
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	18,00	18,00	▼ ▼
	RATA-RATA							38,44	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja, terlihat adanya hasil yang signifikan dalam pencapaian target di berbagai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pertumbuhan investasi. Beberapa indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan dan cakupan regulasi yang mendukung iklim investasi mencapai hasil yang sangat tinggi, dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif telah berjalan dengan baik. Nilai SAKIP perangkat daerah juga masuk dalam kategori tinggi dengan capaian 83%, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Pada, pertumbuhan investasi mencapai 100% dari target, yang menunjukkan adanya peluang dalam mempertahankan dan menarik investasi baru, agar pencapaian ini dapat dipertahankan dan berkelanjutan.

Namun, ada beberapa area yang menunjukkan capaian yang sangat rendah dan memerlukan perhatian mendesak. Program terkait pelayanan perizinan berusaha dan non-berusaha, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta promosi penanaman modal hanya mencapai dibawah 50% dari target yang ditetapkan, yang masuk dalam kategori sangat rendah. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa ada kendala serius dalam implementasi program yang berdampak langsung pada pertumbuhan investasi. Bahkan, realisasi investasi hingga tahun triwulan I tahun 2025 belum terpantau, perlunya upaya yang lebih keras dan strategis untuk memperbaiki situasi ini. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator dalam area ini hanya mencapai

38,44%, menunjukkan bahwa meskipun beberapa program berjalan dengan baik, ada tantangan besar yang harus segera diatasi untuk mencapai target Renstra 2021-2026 secara keseluruhan. Peningkatan koordinasi, evaluasi, dan penguatan program yang lebih efektif diperlukan untuk memperbaiki kinerja di area yang masih tertinggal.

## **13. Kepemudaan Dan Olah Raga**

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga dari 3 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

## **Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 Triwulan I**

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja, terlihat bahwa hasil yang dicapai cukup memuaskan, dengan rata-rata capaian keseluruhan berada di angka 70,83% hingga 97,86%, yang termasuk dalam kategori sedang hingga sangat tinggi. Salah satu area yang menunjukkan performa kurang baik adalah Cakupan pemberdayaan pemuda, dengan capaian 12,55%. Hal ini menunjukkan bahwa program yang ditujukan untuk pemberdayaan pemuda belum berhasil secara optimal. Kondisi ini diyakini mampu berkembang kearah yang lebih baik seiring dengan pelaksanaan kinerja Disporapar di Triwulan selanjutnya. Di sisi lain, prestasi dalam bidang olahraga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan kriteria penilaian realisasi kerja yang sangat tinggi (capaian 91%-100%), menandakan keberhasilan dalam pembinaan atlet.

Sejalan dengan hal tersebut, Program pengembangan daya saing keolahragaan menunjukkan kinerja dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari Disporapar dalam upaya menerapkan strategi untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

#### 14. Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dari 1 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

**Tabel 2. 22 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Tar-	Realisa-		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100,00	32,00	96,00	32,00	33,33	▼▼

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terlihat bahwa capaian kinerja hingga tahun 2025 Triwulan I berada pada tingkat yang sangat rendah. Prosentase ketersediaan data statistik sektoral hanya mencapai 33,33% dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, yang menunjukkan bahwa upaya untuk menyediakan data statistik sektoral yang komprehensif belum berhasil secara optimal. Capaian ini berada jauh di bawah kategori "Sangat Tinggi" yang diharapkan (91% ≤ 100%) dan bahkan tidak mencapai kategori "Sedang" (66% ≤ 75%), mengindikasikan adanya kendala signifikan dalam pengumpulan, pengelolaan, atau penyebaran data statistik sektoral.

Capaian yang sangat rendah ini menandakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi

yang digunakan dalam program ini. Tanpa data statistik sektoral yang memadai, perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor dapat terhambat, mengingat pentingnya data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan. Upaya perbaikan dapat mencakup peningkatan kapasitas pengumpulan data, penyempurnaan metodologi statistik, dan penguatan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan statistik sektoral. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi guna memastikan ketersediaan data yang lebih baik di masa mendatang.

## 15. Persandian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dari 1 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Tar get	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Ketersediaan sarana keamanan informasi	%	69,00	47,00	67,00	47,00	70,14	■

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terlihat bahwa capaian hingga tahun 2025 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Prosentase ketersediaan sarana keamanan informasi hanya mencapai 70,14% dari target yang direncanakan, yang menempatkan kinerja program ini dalam kategori "Sedang". Ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam penyediaan sarana keamanan informasi, hasilnya masih belum optimal dan belum mencapai tingkat ketersediaan yang diharapkan.

Capaian yang berada di kategori "Sedang" ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan keamanan informasi yang lebih baik. Mengingat pentingnya keamanan informasi dalam era digital, peningkatan ketersediaan sarana keamanan informasi adalah hal yang mendesak. Hal ini mungkin memerlukan peningkatan investasi dalam teknologi keamanan, pelatihan lebih lanjut bagi personel yang terlibat, serta penguatan kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra, perlu adanya upaya yang lebih fokus dan terkoordinasi dalam meningkatkan ketersediaan dan efektivitas sarana

keamanan informasi agar dapat mencapai kategori "Tinggi" atau "Sangat Tinggi" dalam waktu dekat.

## 16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dari 4 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Tar-</b> <b>get</b>	<b>Realisa-</b> <b>si sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
2.1	Meningkatnya pengembangan Kesenian, nilai budaya dan Pelestarian situs, Cagar Budaya dan budaya Lokal	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	18	12,07	13	12,07	92,85	● ●
		Persentase Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	%	66	73,22	55	72,22	100,00	● ●
		Warisan Budaya yang dilestarikan	buah	1	2	1	2	100,00	● ●
		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	buah	109	174	109	174	100,00	● ●
	RATA-RATA							98,21	
2.22. 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	%	60,00	40,00	40,00	40,00	100,00	● ●
2.22. 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	● ●
2.22. 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	18,00	9,00	13,00	9,00	69,23	■
	RATA-RATA							89,74	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja dari program pengembangan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya hingga tahun 2025, secara keseluruhan menunjukkan performa yang sangat tinggi, dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 98,21% untuk program Meningkatnya Pengembangan Kesenian, Nilai Budaya, dan Pelestarian Situs, Cagar Budaya, dan Budaya Lokal. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target renstra yang ditetapkan, seperti indikator jumlah cagar budaya yang dikelola dan warisan budaya yang dilestarikan, yang masing-masing mencapai kategori sangat tinggi.

Secara umum, program pengembangan kebudayaan, pembinaan sejarah, dan pelestarian cagar budaya telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata capaian sebesar 89,74%. Hampir semua indikator menunjukkan kinerja dengan kategori "Sangat Tinggi", kecuali Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan, yang berada pada kategori "Sedang" dengan capaian sebesar 62,23%. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa tantangan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar target renstra dapat tercapai dengan optimal di sisa periode renstra yang ada.

## 17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dari 2 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2024 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75,00	74,51	75,00	70,70	94,26	● ●
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Perpustakaan	Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	42,00	49,67	51,00	49,67	97,39	● ●
	RATA-RATA							95,83	
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
2.23. 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase pembinaan perpustakaan dan kegemaran membaca	%	50,00	53,84	55,00	42,50	77,27	●
2.23. 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	21,00	45,00	57,00	50,00	87,72	▼ ▼
	RATA-RATA							71,66	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja antar program. Program dengan sasaran peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan perpustakaan menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 95,83%. Indikator "Nilai SAKIP Perangkat Daerah" mencapai 94,26%, sedangkan indikator "Prosentase pengunjung

perpustakaan per tahun" mencapai 97,39%. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan fasilitas perpustakaan telah berjalan dengan sangat baik, mendekati atau mencapai target yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026.

Namun, terdapat program yang menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan yaitu "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" yang hanya mencapai 50%. Karena masih di triwulan I sehingga kendala atau hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah dapat segera diatasi. Sementara itu, program-program lain seperti "Pembinaan Perpustakaan" menunjukkan capaian yang tinggi sebesar 77,27% dan "Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno" sebesar 87,72%. Rata-rata capaian ketiga program sebesar 71,66% menunjukkan kinerja yang baik, namun perlu peningkatan lebih lanjut dan perhatian khusus pada program yang masih tertinggal agar keseluruhan renstra dapat tercapai dengan optimal.

## 18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dari 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capai an
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.3	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal	nilai	23	27,47	27,75	27,47	98,99	● ●
	RATA-RATA							98,99	
2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	29,40	77,50	78,00	56,66	72,64	■
2.24.3	PROGRAM PERLINDUAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	%	24,60	43,30	45,00	33,33	74,06	■

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capai an
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
		pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat							
	RATA-RATA							73,35	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025 Triwulan I, terlihat bahwa sasaran peningkatan kualitas tata kelola kearsipan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian yang mencapai 98,99%. Indikator mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola kearsipan internal sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan harapan, menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan menjadi contoh positif untuk program lain.

Di sisi lain, program pengelolaan arsip dan perlindungan serta penyelamatan arsip menunjukkan capaian yang sama baiknya. Tingkat capaian ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas mencapai 72,64%, masuk dalam kategori "Sedang". Program perlindungan dan penyelamatan arsip mencapai 74,06%, yang juga masuk dalam kategori "Sedang". Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam menjaga keutuhan dan keberadaan arsip yang penting sebagai bahan pertanggungjawaban. Rata-rata capaian untuk kedua program ini hanya mencapai 73,35%, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di bidang ini agar seluruh sasaran renstra dapat tercapai dengan lebih optimal, walaupun tentunya masih di Triwulan I, sehingga masih ada kesempatan untuk meningkatkan capaian.

### 2.2.3.Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dari 3 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.4	Meningkatnya Produksi Perikanan dan nilai produksi ikan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	ton	421,57	-275,86	421,57	-275,86	0	▼▼
		Nilai Produksi	ton	284143	271.204,58	276632	271.204,58	98,03	●●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
		Ikan (Rp. 000)							
1.5	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	0,5	0,7	0,5	0,7	100,00	● ●
	RATA-RATA							66,01	
3.25 .3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap	ton	412,33	401,00	408,25	401,00	98,22	● ●
3.25 .4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton	16015,82	14475	15594,25	14475	92,82	● ●
3.25 .5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB	Kelompok	75,00	55,00	65,00	55,00	84,61	●
3.25 .6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	%	75,00	60,00	70,00	60,00	85,71	●
	RATA-RATA							90,34	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan data kinerja sektor perikanan hingga Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa capaian indikator secara umum menunjukkan tren positif, meskipun terdapat indikator yang belum menunjukkan progres. Indikator "Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)" menunjukkan nilai negatif, baik pada target maupun realisasi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gangguan iklim dan cuaca ekstrem seperti kemarau panjang atau banjir yang menghambat aktivitas perikanan tangkap, serta penurunan kualitas lingkungan perairan akibat pencemaran yang menyebabkan kematian ikan budidaya.

Kinerja program-program di bawah sektor perikanan juga relatif baik. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya masing-masing mencatat capaian 98,22% dan 92,82%, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, indikator kelembagaan seperti jumlah pembudidaya bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan persentase pelaku usaha yang memiliki izin RTP (Rumah Tangga Perikanan) menunjukkan tingkat capaian di atas 84%, menandakan bahwa tata kelola dan pembinaan sektor ini berjalan cukup efektif. Secara keseluruhan, capaian rata-rata indikator pada sektor ini

adalah 90,34%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan mendukung pencapaian target Renstra 2021–2026.

## 2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Tar-</b>	<b>Realisa-</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
2.1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	NA	0	28,89	0	0	▼ ▼
	RATA-RATA							0	
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan	%	50,00	40,00	50,00	40,00	80,00	●
03:26: 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase even pariwisata yang dilaksanakan	%	19,00	15,00	17,00	15,00	88,23	●
03:26: 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan	%	50,00	31,20	43,70	31,20	71,39	■
	RATA-RATA							79,87	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa sektor pariwisata mengalami tantangan signifikan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan masih 0%, yang termasuk dalam kategori "Rendah". Hal ini menunjukkan bahwa target kunjungan wisata belum tercapai secara optimal, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya daya tarik destinasi atau kendala dalam pemasaran pariwisata. Rata-rata capaian keseluruhan indikator untuk sasaran ini juga berada pada angka yang rendah, yaitu 0%, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan strategi dan implementasi program pariwisata.

Selanjutnya, program-program terkait peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif menunjukkan performa yang sangat rendah, masing-masing dengan capaian hanya 80% dan 71%. Kinerja ini menandakan adanya hambatan serius dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi

wisata dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sektor pariwisata. Di sisi lain, program pemasaran pariwisata menunjukkan hasil yang lebih baik dengan capaian 100%, menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan even pariwisata. Namun, rata-rata capaian keseluruhan program pariwisata sebesar 79,87%, yang juga masuk dalam kategori "Tinggi". Ini menunjukkan peningkatan aspek pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata berjalan baik.

### 3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dari 15 indikator kinerja sasaran dan 12 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Padi, Jagung, Kedelai dan Produksi pada Komoditas Pertanian Utama	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	70,45	70,64	69,72	66,49	95,36	● ●
		Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	79,81	88,05	79,65	86,08	100,00	● ●
		Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	19,15	22,33	18,94	27,18	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Padi (Ton)	Ton	8595,46	13.105,76	8385,82	13.105,76	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	Ton	422,97	2.151,76	331,61	2.151,76	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	Ton	56,3	267,14	51,12	267,14	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi bawang merah (ku)	Ku	5,96	40,61	5,95	40,61	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Cabe (ku)	Ku	10,71	54,56	10,67	54,56	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	Ton	5,00	143,64	5,00	143,64	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Tebu	Ton	25,96	-1.180,74	25,71	-1.180,74	0	▼ ▼
		Peningkatan Produksi Pisang (ku)	Ku	15,00	61,66	11,00	61,66	100,00	● ●
		Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	Ton	7,604	146,81	6,034	146,81	100,00	● ●
1.3	Meningkatnya Produksi Daging dan telur yang berkualitas	Peningkatan Produksi Daging (Ton)	Ton	300,79	1.381,09	163,44	1.381,09	100,00	● ●
		Prosentase Daging ASUH	%	93,4	92,86	93,2	92,86	99,63	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	poin	80,00	76,00	78,00	76,00	97,43	● ●
	RATA-RATA							92,82	
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	%	97,00	96,50	97,00	96,59	99,48	● ●
		Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	94,00	93,1	93,8	93,1	99,25	● ●
		Prosentase Kelompok Menggunakan Alsintan	%	80,00	77,00	78,00	77,00	98,71	● ●
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	%	80,00	77,00	78,00	77,00	98,71	● ●
		Jumlah Luas Tanam (Ha)	Ha	50216,00	49907	50079	49907	99,65	● ●
		Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	%	51,00	47,00	49,00	47,00	95,91	● ●
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase gagal panen	%	3,00	3,00	3,00	3,00	100	● ●
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kenaikan nilai klas kelompok	%	3,00	2,5	3,00	2,50	83,33	●
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	35,00	34,00	34,50	34,00	98,55	● ●
		Jumlah Populasi ternak (animal unit)	unit	21227,72	20666,02	20976,01	20666,02	98,52	● ●
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berjin	%	100,00	90,00	95,00	90,00	94,73	● ●
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	%	0,10	0,10	0,10	0,10	100,00	● ●
	RATA-RATA							97,24	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis terhadap data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian di sektor pertanian dan pelayanan publik. Beberapa indikator kinerja di sektor pertanian, seperti produktivitas padi, jagung,

kedelai, serta penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan benih padi bersertifikat, menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan persentase mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa beberapa aspek dalam sektor pertanian telah berhasil mencapai target renstra dengan baik, yang mengindikasikan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan dalam bidang ini. Namun, ada beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang sangat rendah, terutama dalam hal peningkatan produksi tebu bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan (0%). Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya mempertahankan dan peningkatan produksi pertanian yang perlu segera diatasi untuk mencapai target renstra yang lebih luas.

Di sisi lain, indikator-indikator terkait pelayanan publik dan kesehatan hewan juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Nilai SAKIP PD, meskipun berada pada kategori "Tinggi" dengan capaian 97,43%, masih memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih optimal. Sementara itu, program-program seperti pengendalian bencana pertanian dan pengendalian penyakit zoonosis menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan rata-rata mencapai 97,24%. Namun, tantangan tetap ada di beberapa area seperti jumlah populasi ternak, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan populasi ternak. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa keberhasilan yang signifikan, data ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperkuat upaya dalam sektor-sektor yang masih tertinggal untuk memastikan bahwa semua target renstra dapat tercapai dengan baik.

#### 4. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dari 5 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.3	Meningkatnya Kualitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Non- Migas	%	0,50	15,46	0,45	15,46	100,00	● ●
		Persentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	1,40	0	1,50	0	100,00	● ●
		Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	99,00	80,77	96,1	80,77	84,04	●
		Persentase Pasar Tertib Ukur	%	53,8	57,7	46,1	57,7	100,00	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.4	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,000	75,13	75,00	75,13	100,00	● ●
	<b>RATA-RATA</b>							<b>96,80</b>	
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang baik	%	99,00	80,77	96,1	80,77	84,04	●
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	%	6,70	100,00	6,6	100,00	100,00	● ●
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Ekspor	%	0,50	15,46	0,45	15,46	100,00	● ●
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	53,80	57,7	46,1	57,77	100,00	● ●
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	10,00	42,39	10,00	42,39	100,00	● ●
3.30.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼ ▼
	<b>RATA-RATA</b>							<b>88,63</b>	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa sektor perdagangan menunjukkan kinerja yang beragam dengan beberapa indikator mencapai hasil yang sangat tinggi, sementara yang lain masih memerlukan upaya pencapaian. Indikator seperti persentase kenaikan nilai ekspor non-migas, pengendalian harga, dan penggunaan serta pemasaran produk dalam negeri mencapai capaian 100%, yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga,

mempromosikan produk lokal, dan mendorong ekspor non-migas. Di sisi lain, indikator-indikator terkait kualitas aparatur dan pelayanan publik, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah, juga menunjukkan kinerja yang cukup baik namun dengan beberapa catatan. Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang tinggi sebesar 100%, mengindikasikan adanya peningkatan dalam tata kelola aparatur pemerintahan. Namun, persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah yang hanya mencapai 25% menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi program-program yang mendukung urusan pemerintahan. Rata-rata capaian keseluruhan untuk program-program ini berada di angka 88,63%, yang masuk dalam kategori "Tinggi". Meskipun begitu, masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam pengelolaan izin usaha dan penunjang urusan pemerintahan untuk memastikan seluruh target renstra dapat tercapai dengan optimal.

## 5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dari 2 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Targ et</b>	<b>Realisa si sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
2	Terwujudnya pertumbuhan produktivitas PDRB sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,40	3,63	6,06	3,63	59,90	▼
2.1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	40,55	38,15	40,5	38,15	94,19	● ●
	RATA-RATA							77,04	
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	17,00	10,00	17,00	10,00	58,82	▼
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	%	90,00	48,00	90,00	48,00	53,33	▼
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara Lengkap dan Terkini	dok	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	● ●
	RATA-RATA							70,71	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa sektor industri pengolahan menghadapi tantangan besar dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan hanya mencapai 59,90%, yang berada dalam kategori "Sangat Rendah". Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini jauh dari harapan, mengindikasikan adanya kendala yang signifikan dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Meskipun persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan mencapai 94,19%, yang tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi", capaian keseluruhan masih tertekan oleh rendahnya pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Rata-rata capaian untuk sasaran ini berada di angka 74,04%, yang menempatkannya dalam kategori "Sedang", menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi hambatan di sektor ini.

Selanjutnya, program-program yang mendukung perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi industri nasional juga menunjukkan performa yang kurang memuaskan. Penyelesaian dokumen RIPIK hanya mencapai 58,82%, penerbitan IUI kecil dan menengah hanya 53,33%, dan ketersediaan informasi industri yang lengkap serta terkini telah mencapai 100%. Sehingga ada informasi dari dokumen yang ada belum termanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian kegiatan perindustrian. Rata-rata capaian program-program ini hanya sebesar 70,71%, yang mengindikasikan adanya ruang yang luas dalam pelaksanaan dan pencapaian target program di sektor industri. Secara keseluruhan, kinerja di sektor industri memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa target-target renstra dapat dicapai secara lebih efektif dan optimal.

## 6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dari 1 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan data capaian indikator kinerja program pembangunan kawasan transmigrasi hingga tahun 2025, terlihat bahwa program ini telah

berjalan dengan sangat baik. Indikator terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi mencapai 100%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program transmigrasi hampir mencapai target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2021-2026. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan eksekusi program, yang memungkinkan alokasi pemberangkatan transmigrasi terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Namun, meskipun capaian ini sangat tinggi, masih terdapat sedikit ruang untuk mempertahankan capaian 100% target yang ditetapkan. beberapa faktor kecil yang mungkin perlu ditinjau dan disempurnakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh target terpenuhi sepenuhnya. Secara keseluruhan, program pembangunan kawasan transmigrasi menunjukkan performa yang sangat baik dan menjadi contoh keberhasilan dalam pelaksanaan program pemerintah, tetapi tetap diperlukan pemantauan dan penyempurnaan berkelanjutan untuk mempertahankan capaian ini.

#### **2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **1. Sekretariat Daerah**

Kinerja penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah dari 4 indikator kinerja sasaran dan 1 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan I**

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Renstr a 2021- 2026	Realis asi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingka t Capaia n Renstr a s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaia n
						Target	Reali sasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100 %	(10)
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	101,01	100	24,45	24,45	▼ ▼
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	113,26	100	12,06	12,06	▼ ▼
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100	23,61	23,61	▼ ▼
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	ang ka	80	63,07	79	63,07	79,83	●
<b>RATA-RATA</b>								<b>32,50</b>	
4.1 .2	PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100,00	100	100	14,29	14,29	●
		Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	97,00	100,00	97,00	72,22	74,45	●

Ko de	Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capai a n Renstr a s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capai a n
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100 %	(10)
		Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	▼▼
4.1 .3	PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	47,06	47,06	▼▼
		Cakupan pengadaan barang dan jasa	nilai	55,00	77,49	50,00	77,49	100,00	●●
		Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100,00	100,00	100,00	12,50	12,50	▼▼
0.0 .1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	%	95,00	100,00	90,00	25,00	27,77	▼▼
0.0 .1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	20,83	20,83	▼▼
		Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100,00	100,00	100,00	25	25	▼▼
RATA-RATA								38,15	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa capaian dalam beberapa program penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berada pada tingkat yang sangat rendah. Sebagian besar indikator kinerja, seperti cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan, perekonomian, serta administrasi umum, menunjukkan tingkat capaian yang sangat rendah. Misalnya, cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat hanya mencapai 47,06%, dan cakupan perumusan kebijakan perekonomian serta pembangunan hanya mencapai 12,50%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan dan program di sektor-sektor ini, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan, koordinasi, dan eksekusi program-program pemerintahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian yang lebih baik, meskipun masih berada di bawah target optimal. Misalnya, nilai SAKIP perangkat daerah mencapai 79,83%, yang termasuk dalam kategori "Sedang", menunjukkan adanya peningkatan namun masih memerlukan upaya lebih lanjut. Program pengadaan barang dan jasa menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100%, namun program-program lain seperti peningkatan sarana dan prasarana kerja serta kualitas SDM OPD hanya mencapai 25%, itu

karena masih kondisi triwulan I, yang masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Secara keseluruhan, rata-rata capaian dari seluruh indikator berada pada 38,15%, yang mengindikasikan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masih memerlukan perhatian dan perbaikan serius untuk memastikan tercapainya target renstra 2021-2026 secara efektif dan efisien.

## 2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD dari 3 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRDTahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Legislasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Legislasi	angka	80,00	84,53	78,00	84,53	100,00	● ●
1.2	Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Penganggaran dan Pengawasan	angka	80,00	84,12	78,00	84,53	100,00	● ●
1.3	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,00	61,98	72,00	46,17	64,13	▼
	RATA-RATA							42,23	
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	90,00	86,66	90,00	26,73	13,39	▼ ▼
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelayanan Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Bagian Anggaran dan Pengawasan	%	100,00	96,98	100,00	17,25	17,25	▼ ▼
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	98,98	100,00	23,71	27,71	▼ ▼
	RATA-RATA							20,48	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan pendukung DPRD di bidang legislasi dan penganggaran serta pengawasan menunjukkan kinerja yang tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang legislasi dan penganggaran serta pengawasan masing-masing mencapai 100% dan 100%, yang berada dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendukung yang diberikan kepada DPRD dalam dua bidang ini telah mampu memenuhi harapan dan target yang telah ditetapkan. Tingginya capaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas layanan, respon terhadap kebutuhan DPRD, dan koordinasi antara perangkat daerah dan DPRD.

Selain itu, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta program penunjang urusan pemerintahan daerah juga menunjukkan hasil yang mengecewakan. Presentase pelaksanaan program dukungan pelaksanaan tugas DPRD dan pelayanan dukungan pada bagian anggaran dan pengawasan hanya mencapai 13,39% dan 17,25%, yang juga berada dalam kategori "Sangat Rendah". Rata-rata capaian keseluruhan indikator ini hanya sebesar 20,48%, yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam efektivitas pelaksanaan program-program terkait. Hasil ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring program untuk memastikan bahwa layanan pendukung DPRD dapat berfungsi secara optimal dan memberikan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2026.

## **2.2.5.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Perencanaan**

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan dari 3 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)* 100%	(10)
1.1	Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	75,00	99,40	96,00	100,00	100,00	● ●
1.2	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	%	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)* 100%	(10)
1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	nilai	81,00	85,20	77,00	0	100,00	●
	RATA-RATA							100,00	
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )	%	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	● ●
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	● ●
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	98,32	100,00	98,32	98,32	●
	RATA-RATA							100,00	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar program dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah telah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Indikator keselarasan RKPD terhadap RPJMD di berbagai bidang, seperti perekonomian, sumber daya alam, pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur, dan kewilayahannya, semuanya mencapai 100%, yang menunjukkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang optimal. Selain itu, persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah juga mencapai 100%, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator dalam kategori ini adalah 100%, yang menempatkannya dalam kategori "Sangat Tinggi". Ini mencerminkan keberhasilan yang signifikan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan target renstra.

Namun, meskipun secara umum capaian indikator menunjukkan performa yang kurang baik, ada satu indikator yang berada di kategori "rendah," yaitu nilai SAKIP, yang masih kosong, ini dikarenakan pada capaian triwulan I ditahun 2025 nilai belum keluar. Secara keseluruhan, rata-rata capaian dari semua program dan sasaran ini adalah 100%, menunjukkan bahwa perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.

## 2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan dari 2 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LHP BPK atas LKPD	Kategori	4	menunggu hasil pemeriksaan BPK RI	4	menunggu hasil pemeriksaan BPK RI	0	▼ ▼
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	menunggu hasil evaluasi Inspektorat	75	menunggu hasil evaluasi Inspektorat	0	▼ ▼
	RATA-RATA							0	
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD	%	100,00	100,00	100,00	6,04	6,04	▼ ▼
		Persentase OPD yg taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yg telah ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00	51,04	51,04	▼ ▼
		Persentase ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100,00	100,00	100,00	5,56	5,56	▼ ▼
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100,00	100,00	100,00	11,25	11,25	▼ ▼
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN	Prosentase Peningkatan Target PAD	%	3-5%	115,49	3-5%	27,36	100,00	● ●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
	PENDAPATAN DAERAH								
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	43,48	43,48	▼ ▼
	RATA-RATA							36,23	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kualitas aparatur serta pelayanan publik masih jauh dari target yang ditetapkan. Indikator-indikator kunci seperti Opini LHP BPK atas LKPD dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang sangat rendah, dikarenakan menunggu hasil pemeriksaan BPK RI dan menunggu hasil evaluasi Inspektorat.

Selain itu, program-program terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah juga menunjukkan capaian yang sangat rendah, dengan rata-rata capaian hanya 36,23%. Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD, ketepatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan ketertiban tata kelola barang milik daerah semuanya berada dalam kategori "Sangat Rendah", dengan persentase capaian yang sangat jauh dari target, seperti hanya 6,04% untuk kepatuhan dalam penyusunan RAPBD. Hal tersebut dikarenakan pengukuran masih sampai dengan Triwulan I. Namun, terdapat satu indikator yang menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu peningkatan target PAD yang mencapai 100%, menunjukkan bahwa meskipun ada kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan aset, upaya peningkatan pendapatan daerah masih berhasil dengan baik. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa perlu ada upaya yang lebih terstruktur dan intensif untuk memperbaiki manajemen keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2026.

### 3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	80	NA	75	NA	#VALUE!	#VALU E!
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Administasi Kepegawaian Daerah	%	92,5	89,79	90,25	89,79	99,49	● ●
	RATA-RATA							#VALUE!	
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
		Prosentase pemenuhan formasi usulan ASN	%	100,00	91,85	98,00	91,85	93,72	● ●
		Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	%	80,00	67,85	70,00	67,85	96,93	● ●
		Prosentase penanganan kasus kepegawaian	%	90,00	100,00	87,00	100,00	100,00	● ●
	RATA-RATA							98,13	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa program-program terkait kualitas manajemen ASN dan penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sebagian besar indikator, seperti persentase administrasi kepegawaian daerah, penyelesaian administrasi kepegawaian, pemenuhan formasi usulan ASN, serta penanganan kasus kepegawaian, mencapai nilai yang sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 98,13%. Ini menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian di daerah telah berjalan dengan baik, dengan tingkat pemenuhan dan penyelesaian yang hampir mencapai target renstra. Indikator ini menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan kepegawaian, yang penting untuk mendukung kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan.

Namun, ada catatan penting terkait indikator "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)" yang tidak memiliki data capaian

(NA) hingga tahun 2025, sehingga tidak bisa dianalisis dengan tepat. Ketidakhadiran data ini bisa mengindikasikan adanya masalah dalam pengumpulan atau pelaporan data, atau mungkin menandakan keterlambatan dalam evaluasi kinerja instansi pemerintahan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, kinerja manajemen ASN dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menunjukkan hasil yang sangat positif, yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi yang lebih baik di seluruh instansi pemerintahan.

#### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Pendidikan dan Pelatihan dari 1 indikator kinerja sasaran dan 1 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Tar get</b>	<b>Realisa si sd Trw II</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Pengembangan ASN	%	88,50	98,82	86,00	98,82	100,00	● ●
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	%	98,00	98,82	94,00	98,82	100,00	● ●

*Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah*

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, program yang berfokus pada peningkatan kualitas manajemen ASN dan pengembangan sumber daya manusia menunjukkan hasil yang sangat positif. Indikator "Presentase Pengembangan ASN" mencapai tingkat capaian 100%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kompetensi ASN di daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2021-2026. Kesuksesan ini mencerminkan adanya komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN melalui berbagai program pengembangan.

Selain itu, indikator lain seperti "Presentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana" juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan nilai 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa program-program pengembangan kompetensi telah dilaksanakan secara optimal, memastikan bahwa ASN memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Secara

keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di daerah telah mencapai performa yang sangat baik, dengan tingkat keberhasilan yang mendekati sempurna, yang penting untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.

## 5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Penelitian dan Pengembangan dari 1 indikator kinerja sasaran dan 1 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Peneltian dan Pengembangan Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisa si Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisa si sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	● ●
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, program yang berfokus pada peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan (kegiatan penelitian dan pengembangan) dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Indikator "Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah" mencapai tingkat capaian 100%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Ini menandakan bahwa hasil-hasil penelitian telah berhasil dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026. Pemanfaatan yang maksimal ini mencerminkan efektivitas dalam mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kebijakan dan strategi pembangunan daerah, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Selain itu, indikator "Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan" juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan

nilai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua hasil penelitian dan pengembangan telah dimanfaatkan sepenuhnya, menunjukkan keberhasilan program penelitian dan pengembangan daerah dalam menghasilkan output yang relevan dan berguna bagi pembangunan daerah. Kesuksesan ini menggambarkan koordinasi yang baik antara tim penelitian dan pemangku kepentingan daerah dalam menerapkan hasil penelitian, serta menunjukkan bahwa proses kelitbangan di daerah telah terarah dan efektif. Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa program kelitbangan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.

## **2.2.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**

### **1. Inspektorat Daerah**

Kinerja penyelenggaran Urusan Pengawas Urusan Pemerintahan – Inspektorat Daerah dari 3 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Tahun 2025 Triwulan I**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
1.1	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	9	10	9	90	● ●
1.2	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	100,0	● ●
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79	78	79	78	98,73	● ●
	RATA-RATA							97,82	
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP	%	90,00	100,00	89,25	25,00	28	▼
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Cakupan pendampingan dan Asistensi di bidang Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	25,00	25	▼ ▼
00:00:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase cakupan pemenuhan	%	80,00	100,00	80,00	25,00	31,25	▼

<b>Kode</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)</b>	<b>Status Capaian</b>
						<b>Target</b>	<b>Realisasi sd Trw I</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7) *100%	(10)
	PEMERINTAHAN DAERAH	urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan							
	RATA-RATA							27,85	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terdapat perbedaan yang signifikan antara pencapaian dalam pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan program-program pendukung pengawasan lainnya. Indikator seperti "Maturitas SPIP" dan "Peningkatan Kapabilitas APIP" menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPIP dan kapabilitas APIP telah berjalan efektif sesuai target yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa fondasi pengawasan internal di pemerintahan daerah telah kuat dan berfungsi dengan baik, mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, capaian program-program yang lebih teknis dalam bidang pengawasan, seperti cakupan jenis pengawasan internal oleh APIP dan cakupan pendampingan serta asistensi di bidang pengawasan, menunjukkan hasil yang jauh lebih rendah. Persentase cakupan pengawasan internal yang dilakukan APIP hanya mencapai 28%, sementara cakupan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan bahkan lebih rendah, yaitu 25%, keduanya berada dalam kategori "Rendah" hingga "Sangat Rendah". Hal ini dikarenakan capaian baru di triwulan ke I, meskipun fondasi pengawasan sudah kuat, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengawasan teknis untuk memastikan semua aspek pengawasan pemerintahan daerah dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang diharapkan.

## 2.2.7. Unsur Kewilayahan

### 1. Kecamatan

Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan – Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo dari 2 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahann Tahun 2025  
Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	39,17	39,17	▼ ▼
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur Dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	nilai	70,00	60,81	65,00	65,00	100,00	● ●
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
7.1.3	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	99,94	100,00	50,00	50,00	▼ ▼
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	99,94	100,00	50,00	50,00	▼ ▼

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar program yang terkait dengan pelayanan publik dan pemerintahan daerah menunjukkan hasil yang sangat rendah. Misalnya, persentase peningkatan pelayanan kecamatan hanya mencapai 39,17%, yang berada dalam kategori "Sangat Rendah". Begitu pula dengan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang semuanya hanya mencapai 50%. Capaian yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa program-program tersebut mengalami hambatan yang signifikan dalam implementasinya, yang

mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2026.

Di sisi lain, satu indikator yang menunjukkan hasil yang sangat baik adalah Nilai SAKIP PD, yang mencapai 100%, masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak program yang tertinggal, ada keberhasilan dalam aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Namun, capaian ini tidak cukup untuk menutupi rendahnya kinerja di program-program lainnya, yang secara keseluruhan menunjukkan perlunya perhatian serius dan perbaikan dalam implementasi kebijakan dan program di tingkat daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian program berada di bawah ekspektasi, menandakan bahwa langkah-langkah strategis harus diambil untuk mengatasi masalah yang menghambat keberhasilan program-program tersebut, agar dapat mendekati target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

## 2.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

### 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Kinerja penyelenggaran Unsur Pemerintahan Umum – Kesatuan Bangsa dan Politik dari 4 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

**Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025 Triwulan I**

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
1.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila	Presentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	%	93,00	86,00	92,00	86,00	93,47	● ●
1.2	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat;	Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	● ●
1.3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama	Presentase kegiatan kerukunan umat beragama	%	88,00	80,00	83,00	80,00	96,38	● ●
1.4	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,00		80,00			▼ ▼
	RATA-RATA							73,43	
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan	%	92,00	84,00	97,00	84,00	86,59	●

Kode	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian
						Target	Realisasi sd Trw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100%	(10)
		karakter bangsa							
8.1.4	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	80,00	89,00	80,00	80,00	100,00	● ●
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	91,00	84,00	90,00	84,00	93,33	● ●
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase pemahaman politik bagi masyarakat	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	● ●
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase masyarakat yang paham terhadap sosial, budaya, dan agama	%	88,00	80,00	83,00	80,00	96,38	● ●
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	● ●
RATA-RATA								95,85	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 data diolah

Berdasarkan analisis data capaian indikator kinerja hingga tahun 2025, program-program yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, kehidupan demokrasi, partisipasi politik, serta kerukunan umat beragama menunjukkan hasil sedang. Rata-rata capaian indikator untuk program-program ini berada pada tingkat di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aspek-aspek penting kehidupan berbangsa telah berhasil secara signifikan, mendekati atau mencapai target renstra 2021-2026.

Selain itu, program-program terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, pemberdayaan ormas, peningkatan kewaspadaan nasional, dan pendidikan politik juga menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan rata-rata capaian 95,85%. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, misalnya, mencapai 93,33%,

yang menunjukkan efektivitas dalam menjaga stabilitas dan keamanan sosial. Meskipun ada sedikit variasi dalam nilai capaian, secara keseluruhan, semua program menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten, berada dalam kategori "Sangat Tinggi". Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan program-program strategis yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan kerukunan di masyarakat.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum diatasi.

#### **2.3.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

##### **A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

- a. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD yang dimungkinkan karena masih rendahnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anaknya yang berusia balita ke sekolah PAUD.
- b. Masih cukup banyak persentase anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP yang diakibatkan permasalahan dalam keluarga terutama masalah ekonomi keluarga yang kurang maupun masalah sosial psikologis ataupun pergaulan yang dihadapi peserta didik sehingga membuat anak didik tidak bisa melanjutkan pendidikan.
- c. Masih adanya bangunan/ruang kelas SD/Sederajat keadaan rusak sedang dan dalam keadaan rusak berat sehingga memerlukan penanganan.
- d. Masih banyak guru yang memiliki kualifikasi ijazah di bawah D4/S1 sehingga menyebabkan target Persentase Guru SD & SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tidak terpenuhi.
- e. Distribusi jumlah guru di tingkat pendidikan dasar kurang seimbang dengan jumlah siswa antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

###### **2. Kesehatan**

- a. Ibu hamil dengan permasalahan risiko tinggi pada kehamilan dan tidak pernah kontak dengan tenaga kesehatan karena menutupi kehamilannya dapat memperberat proses persalinan pada kondisi resti yang baru ditemui oleh tenaga kesehatan; kehamilan usia dini  $< 20$  tahun, remaja belum menikah menutupi kehamilannya sehingga tidak terpantau tenaga kesehatan.
- b. Penatalaksanaan Ibu hamil KEK dan anemia belum disertai pendampingan dan penanganan maksimal sehingga dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah

- c. Kondisi sakit berat dengan komplikasi pada balita menyebabkan gangguan pada balita baik organ tubuh , pernafasan dan jantung yang berakibat pada ketidakmampuan balita bertahan hidup bahkan sampai pada kematian
- d. Kesadaran orang tua tentang Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) masih kurang sehingga anak tidak mendapat makanan dengan gizi seimbang ; sanitasi lingkungan yang buruk ; riwayat BBLR ; riwayat penyakit infeksi yang berulang pada anak
- e. Belum optimalnya skrining pada pekerja di perusahaan; Keterbatasan personel tim pendamping yang harus menjangkau seluruh wilayah Kab.Sukoharjo
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan aktifitas fisik

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan capaian kinerja sektor pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

- a. Secara keseluruhan kondisi permukaan jalan di Kabupaten Sukoharjo belum maksimal, karena kondisi jalan baik 50,33%, sedang 39,21%, rusak ringan 9,26% dan rusak berat sebesar 1,19%;
- b. Masih luasnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan, yaitu sekitar 44,27 % dari luas daerah genangan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase yang dibarengi dengan ada dan kurangnya pengawasan serta pengendalian terhadap pengelolaan jaringan drainase. Disamping itu juga disebabkan karena sistem drainase perkotaan belum terintegrasi dan kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai;
- c. Masih adanya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak, dimana kondisi baik baru 29,58%, sedangkan kondisi rusak ringan sekitar 3,30% terdiri dari rusak sedang 55,94% dan rusak berat 11,19%;
- d. Pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo tiap tahunnya menurun di tahun 2024 pembangunan drainase 4.875,55 m, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki kerawanan bencana akan banjir di seluruh wilayah.
- e. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pada air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pada tahun 2024 masih ada 5,35% penduduk yang belum mengakses air minum perpipaan maupun non perpipaan;
- f. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
- g. Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan IPAL pada tahun 2024 baru 2.817 KK;

- h. Masih rendahnya Capaian Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat atau capaian sanitasi pada tahun 2024 sebesar 1,41%;
- i. Belum optimalnya Capaian sanitasi layak tahun 2024 masih 99,79, sehingga masih ada 0,21 % penduduk yang belum memiliki sanitasi layak.
- j. Belum seluruh Perkotaan mempunyai rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan.
- k. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Persetujuan Bangunan Gedung.

#### **4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan capaian kinerja sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2024, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

- a. Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni sesuai SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 tentang Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebanyak 11.524. Jumlah RTLH pada Tahun 2024 sejumlah 6.662 unit.
- b. Tingginya luasan kawasan permukiman kumuh sesuai Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha. Penanganan kumuh pada tahun 2023 seluas 11,710 Ha sehingga luasan kumuh yang tersisa seluas 608,346 Ha. Penanganan kumuh tahun 2024 seluas 14,463 Ha sehingga luasan kumuh yang tersisa tahun 2024 seluas 593,886 Ha. Hal ini disebabkan oleh ketidak teraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, jalan lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya proteksi terhadap bahaya kebakaran;
- c. Belum optimalnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), sampai dengan tahun 2024 penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah sebanyak 212 perumahan.
- d. Masih tingginya angka backlog rumah sejumlah 22.045 unit.
- e. Belum optimalnya ketersedian dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### **5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan**

- a. Masih lemahnya kemampuan dan ketrampilan anggota Satpol PP dan PPNS terhadap penguasaan Perda dan Perbup.
- b. Masih banyak Perda/Perbup yang hanya mengandung sanksi administrasi tanpa ada sanksi pidana, serta Perda yang mengandung sanksi 3 (tiga) bulan keatas.
- c. Anggota PPNS masih menyebar diberbagai Perangkat Daerah.
- d. Perlu adanya specialisasi keahlian PPNS terhadap penguasaan Perda dan Perbup.

- e. Masih perlu membutuhkan perhatian adalah masalah penyelesaian angka kriminalitas karena persentasenya belum mencapai 80%.
- f. Perlu peningkatan kinerja Kader Siaga Trantib (KST) sebagai wujud partisipasi masyarakat.
- g. Masih rendahnya SDM sebagian anggota Satlinmas.
- h. Belum terbentuk kelembagaan Satlinmas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- i. Dengan keberadaan Pemadam Kebakaran yang menjadi bagian dari Satpol PP, maka perlu ditingkatkan SDM anggota Damkar dalam pelayanan penanganan Pemadaman Kebakaran.
- j. Optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran prokumda termasuk pelanggaran aset, serta perlu dilakukan pemetaan SDM dan sarpras sehingga intervensi kebijakan dan dukungan anggaran dapat di fokuskan sesuai dengan pemetaan kebutuhan tersebut.
- k. Optimalisasi pemetaan dalam sektor kebakaran seperti pemetaan daerah rawan kebakaran, pemetaan SDM dan sarpras serta pemetaan jumlah relawan kebakaran. Dimana relawan damkar di provinsi merupakan akumulatif relawan damkar yang ada di Kabupaten/Kota.
- l. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan peningkatan kapasitas Linmas dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan.
- m. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

## **6. Sosial**

- a. Memastikan verval berjalan dengan baik sehingga meminimalisir inclusion eror maupun exclusion eror untuk akurasi data.
- b. Intervensi melalui pemberdayaan masyarakat (empowerment) diperbanyak/diperluas agar kemandirian masyarakat meningkat sehingga peningkatan pendapatan tumbuh dari bawah (masyarakat sebagai subjek pembangunan)
- c. Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan kemiskinan
- d. Konvergensi lintas sektor dilakukan melalui 3 strategi (pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan)
- e. Melaporkan PPKE triwulanan
- f. Bagi TKPK berkinerja baik dilakukan penilaian kinerja TKPK dan mendapatkan reward Insentif fiskal.

## **B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

- a) Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- b) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- c) Pada tahun 2024 ada PHK dari sektor industri tekstil;

- d) Belum optimalnya fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Belum optimalnya pemenuhan hak anak;
  - b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan;
  - c. Masih rendahnya jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan;
  - d. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum semua dilaksanakan.
- 3. Pangan**
- a) Masih ada desa yang masuk dalam kategori desa yang bisa diberi bantuan pemberdayaan desa rawan pangan berdasarkan FSVA adalah Desa yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3, terdapat beberapa desa rawan pangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan secara ekonomi maupun karena gizi buruk akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan, menjadikan ketahanan pangan sangat rentan;
  - b) Dari sisi konsumsi pangan, tidak mudah mengubah pemahaman dan pola konsumsi pangan masyarakat menuju ke arah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras, belum terlihat respon masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan pangan alternatif. Sehingga perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam pembinaan untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Perlu peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan stop boros Pangan.
  - c) Masih adanya perilaku produsen pangan segar dan olahan belum menjamin mutu dan keamanan pangan (food savety). Masih ditemui residu pestisida pada pangan segar dan bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pangan olahan.
- 4. Pertanahan**
- Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur masih ada potensi konflik lahan, meskipun layanan sertifikat sudah 100% di tahun 2024, namun perkembangan pembangunan tetap akan membutuhkan pembebasan tanah yang rawan konflik.
- 5. Lingkungan Hidup**
- a. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
  - b. Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu status tercemar ringan 81,40% dengan koefisien 50, tercemar sedang 0% dengan koefisien 30 dan tercemar berat 0% dengan

koefisien 10, serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang mengalami kenaikan menjadi 32,67 pada tahun 2024;

- c. Emisi gas  $\text{[SO]}^2$  dan  $\text{[NO]}^2$  yang merupakan parameter pencemar udara dari sektor industri dan transportasi namun dengan beberapa upaya preventif yang dilakukan berdampak pada peningkatan IKU yang cukup optimal dari 87,32 pada tahun 2023 pada tahun 2024 menjadi 89,47;
- d. Belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun sudah mengalami penurunan 19% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 emisi GRK yang dilepaskan di Kabupaten Sukoharjo tercatat masih cukup tinggi yaitu 1.963,95 Gg  $\text{[CO]}^2$  eq;
- e. Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumbernya dan kapasitas TPA perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan kapasitas TPA Mojorejo yang hampir penuh, sudah terpakai 99,54% serta kurang aktifnya pemanfaatan TPS3R dalam mengelola sampah dari hul;
- f. Pencapaian IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar 63,59 berarti turun 1,59% apabila dibandingkan dengan capaian IKLH tahun 2023. Dapat dikatakan adanya peningkatan kualitas lingkungan;

#### **6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- a. Strategi terhadap capaian kinerja urusan admindukcapil, terutama pada;
- b. kepemilikan dokumen wajib admindukcapil, terutama pada dokumen wajib yang digunakan untuk pendataan intervensi kemiskinan;
- c. pelayanan verifikasi identitas kependudukan digital yang sebelumnya hanya bisa dilayani di Kecamatan dan dinas. Target 167 desa/ kelurahan di kabupaten Sukoharjo;
- d. Mengintensifkan pelayanan aktif secara jemput bola ke sekolah, universitas, perusahaan, event yang melibatkan banyak massa dengan menghadirkan petugas untuk meningkatkan kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD).

#### **7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- a. Masih sedikitnya desa mandiri di Kabupaten Sukoharjo;
- b. Belum optimalnya kapasitas dan ketrampilan aparatur pemerintahan desa dan kader /kelembagaan masyarakat;
- c. Belum optimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa dan aplikasi profil desa oleh perangkat Desa;
- d. BUMDes yang ada masih didominasi dengan klasifikasi tumbuh (56,55%) sehingga masih perlu pendampingan guna meningkatkan kondisi BUMDes menjadi lebih mandiri dan maju;
- e. Belum adanya regulasi dan penetapan dana pendampingan bantuan keuangan dari pusat dan provinsi;
- f. Kurang optimalnya perangkat desa dalam menangani bantuan Dana Desa baik pengajuan sampai pencairan bantuan;

- g. Masih banyaknya kelompok penerima bantuan TTG yang belum berbadan hukum sesuai syarat utama untuk proposal pengajuan bantuan TTG pada kelompok TTG;
- h. Masih adanya Pasar Desa yang kurang berkembang;
- i. Masih adanya desa yang belum mendirikan Bumdes, dan masih adanya bumdes yang kurang berkembang;
- j. Belum optimalnya koordinasi antar bidang baik pada tahap perencanaan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program kegiatan sehingga pencapaian sasaran belum tercapai secara maksimal.

#### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Stigma dan Norma Sosial yang Negatif:

Stigma dan norma sosial yang negatif terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat menjadi penghalang dalam menerima dan menggunakan layanan yang tersedia. Beberapa masyarakat masih menganggap topik ini sebagai tabu atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau agama mereka. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap program-program tersebut dan menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diperlukan.

- b. Perubahan Demografi dan Urbanisasi:

Perubahan demografi dan urbanisasi dapat menjadi permasalahan tersendiri dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Peningkatan urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat menyebabkan sulitnya mencapai target populasi yang lebih luas. Sementara itu, perubahan dalam struktur demografi seperti peningkatan usia harapan hidup atau perubahan tren kelahiran juga dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan yang diperlukan dalam pengendalian penduduk.

#### **9. Perhubungan**

Berdasarkan capaian kinerja sektor perhubungan tahun 2024, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

- a. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan, ditandai dengan fasilitas keselamatan jalan yang tersedia belum memenuhi jumlah kebutuhan;
- b. Belum optimalnya rasio konektivitas kabupaten, ditenggarai dari Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017 sampai dengan 2024 cenderung mengalami penurunan, dari 37.927 (2017) menjadi 30.432 (2024).
- c. Belum optimalnya kinerja lalu lintas, salah satu bukti pendukungnya adalah rasio trayek dengan jumlah penduduk baru 0,00002;
- d. Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji berkala ditandai dengan kendaraan yang melakukan uji KIR sejumlah 406 dan sertifikat uji KIR yang dikeluarkan 396;

- e. Belum optimalnya pengelolaan perparkiran, dengan bukti capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan.
- f. Belum optimalnya pemasangan PJU
- g. Belum optimalnya pelaksanaan uji emis untuk menurunkan Gas Rumah Kaca.
- h. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas sekitar 1.514 kejadian laka lantas per tahun.
- i. Masih tingginya angka korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas sekitar 90 orang per tahun.
- j. Masih adanya perlintasan sebidang yang belum dipasang palang pintu kereta api.

**10. Komunikasi dan Informatika**

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandai dengan capaian nilai indeks SPBE Tahun 2023 dengan nilai 4,35 dari indeks maksimal yaitu 5,00.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan nilai indeks keterbukaan informasi publik yang masih dalam kriteria menuju informatif agar mencapai informatif.

**11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

- a. Belum optimalnya koperasi yang berkualitas
- b. Belum maksimalnya penguatan dan pendampingan kelembagaan koperasi;
- c. Masih terbatasnya peningkatan Volume usaha UMKM dan penguatan jaringan usaha dan belum maksimalnya pendampingan UMKM berorientasi ekspor

**12. Penanaman Modal**

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Keberlanjutan Kemudahan Pelayanan Investasi
- b. Peluang persebaran investasi yang merata berbasis potensi daerah
- c. Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri.

**13. Kepemudaan Dan Olah Raga**

- a. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
- b. Kurangnya minat pemuda untuk bergabung dalam organisasi kepemudaan;
- c. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan internasional;
- d. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;

- e. Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

#### 14. **Statistik**

Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral yang ada di daerah untuk kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan kebijakan

#### 15. **Persandian**

Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi ditandai dengan belum dilaksanakannya *assessment* indeks keamanan informasi.

#### 16. **Kebudayaan**

Nilai-nilai budaya merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

#### 17. **Perpustakaan**

Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan layanan, koleksi, dan jumlah pengunjung dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan untuk mendukung optimalisasi peran perpustakaan, antara lain:

##### a. Keterbatasan Rasio Perpustakaan terhadap Populasi

Meskipun terdapat peningkatan jumlah perpustakaan, rasio perpustakaan per satuan penduduk masih relatif rendah (0,072 pada 2024). Hal ini menunjukkan distribusi perpustakaan yang belum merata di seluruh wilayah, sehingga akses masyarakat ke perpustakaan masih perlu ditingkatkan.

##### b. Koleksi yang Masih Perlu Diperkaya

Meski jumlah koleksi buku (judul dan eksemplar) meningkat signifikan, pengayaan koleksi harus terus diupayakan agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait literasi digital, pendidikan, dan budaya lokal.

##### c. Kendala dalam Infrastruktur dan Sumber Daya

Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang bersertifikat mengalami peningkatan, tetapi masih perlu ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam mendukung layanan inklusi sosial dan program digitalisasi.

##### d. Kesenjangan Minat Baca di Masyarakat

Rasio pengunjung terhadap populasi menunjukkan peningkatan signifikan (49,67 pada 2024), tetapi upaya membangun budaya membaca secara merata masih menghadapi tantangan, khususnya di wilayah pedesaan yang mungkin kurang terjangkau oleh layanan perpustakaan.

e. Perluasan Layanan Digital

Inovasi berbasis digital seperti e-perpus, TITIKBACA, dan GELIS telah mendukung pertumbuhan pengunjung, tetapi penerapan teknologi digital perlu diperluas untuk mencakup semua kelompok masyarakat, terutama yang belum akrab dengan teknologi.

#### **18. Kearsipan**

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kearsipan masih terdapat beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya pengelolaan arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang belum memenuhi kompetensi kearsipan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai dan sesuai standar kearsipan.

### **C. Urusan Pilihan**

#### **1. Kelautan Dan Perikanan**

- a. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan darat yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan.
- b. Sektor perikanan ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
- c. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.

#### **2. Pariwisata**

- a. Belum optimalnya konsep *eco socio tourism*;
- b. Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
- c. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor Pariwisata (lembaga);
- d. Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- e. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

### **3. Pertanian**

- a. Fluktuasi hasil komoditas pertanian karena adanya anomali iklim yang berpengaruh pada ketersediaan air untuk pertanian. Perubahan iklim juga akan berpengaruh pada pola tanam dan tata tanam sehingga mempengaruhi indek pertanaman. Jenis tanaman berganti ganti di lahan pertanian menyesuaikan ketersedian air setiap masa tanam;
- b. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector pertanian;
- c. belum maksimalnya produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo
- d. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
- e. Belum optimalnya perlindungan terhadap petani
- f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sukoharjo.

### **4. Perdagangan**

- a. Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan info pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- b. Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan kedepan (isu milenial), dimana model distribusi pasar berubah kedepannya.

### **5. Perindustrian**

- a. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- b. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
- c. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan, dan lainnya);
- d. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya;
- e. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam.

### **6. Transmigrasi**

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi.

## **D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

### **1. Sekretariat Daerah**

#### **a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:**

Pemerintah Sekretariat Daerah mungkin menghadapi permasalahan terkait keterbatasan sumber daya manusia. Bisa jadi terdapat kekurangan pegawai yang berkualifikasi dan berpengalaman di bidang administrasi, keuangan, dan manajemen. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas.

#### **b. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:**

Kurangnya koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Sekretariat Daerah juga dapat menjadi permasalahan. Bisa jadi terdapat hambatan dalam berbagi informasi, kerjasama antar unit kerja, atau koordinasi kegiatan yang saling terkait. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan, ketidakjelasan tanggung jawab, dan menghambat efektivitas kerja.

### **2. Sekretariat DPRD**

#### **a. Teknologi dan Sistem Informasi yang Terbatas:**

Keterbatasan teknologi dan sistem informasi juga dapat menjadi permasalahan bagi pendukung Sekretariat DPRD. Penggunaan teknologi yang terbatas, kurangnya integrasi sistem informasi, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang ketinggalan zaman dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja. Kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi modern juga dapat membatasi pengelolaan data dan akses informasi yang cepat dan akurat.

#### **b. Kurangnya Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Kerja:**

Pendukung Sekretariat DPRD mungkin dihadapkan pada permasalahan dalam pembaruan kebijakan dan prosedur kerja yang sesuai dengan perkembangan terkini. Ketidakmampuan dalam mengadopsi perubahan dalam regulasi, kebijakan, atau praktik terbaik dapat menghambat kelancaran tugas administratif dan manajerial. Kurangnya pembaruan kebijakan juga dapat mempengaruhi responsifitas terhadap tuntutan dan isu-isu baru yang muncul dalam proses legislasi dan pengawasan.

## **E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Perencanaan**

- Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;

- c. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah.
2. **Keuangan**
- a. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
  - b. Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
3. **Kepegawaian**
- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
  - b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.
4. **Pendidikan dan Pelatihan**
- a. Belum optimalnya pemenuhan usulan diklat Perangkat Daerah
  - b. Kurangnya Keterlibatan dan Keterkaitan dengan Instansi Pemerintah Lainnya:  
Keterlibatan dan keterkaitan yang kurang dengan instansi pemerintah lainnya dapat menghambat sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kerjasama yang minim antara BKPSDM dengan instansi terkait, seperti lembaga pendidikan, instansi pemerintah pusat, dan sektor swasta, dapat menghambat pertukaran pengetahuan, pengembangan program yang holistik, dan kebijakan yang terintegrasi dalam pendidikan dan pelatihan.
5. **Penelitian dan Pengembangan**
- a. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
  - b. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukungdaya saing daerah.

## **F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

### **1. Inspektorat Daerah**

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

## **G. Unsur Kewilayahan**

### **1. Kecamatan**

Belum meratanya pencapaian komponen angka IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang sudah ditetapkan dalam pelayanan publik merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain SDM yang terbatas dan belum mengikuti kemajuan teknologi serta sarana prasarana yang kurang memadai sehingga mengurangi kenyamanan dan kecepatan pelayanan.

## **H. Unsur Pemerintahan Umum**

### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan analisis ketercapaian indikator tujuan, sasaran dan program hingga triwulan kedua di tahun 2024, permasalahan pembangunan secara umum yang dihadapi oleh Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan; kesehatan; pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; kesetaraan gender; perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak; penguatan keberdayaan pemuda terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
- b. Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu;
- c. Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin;
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Belum mantapnya kualitas infrastuktur;
- f. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
- g. Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah;
- h. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;

- i. Perlunya perluasan kerjasama antar regional daerah, dunia usaha dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondisivitas wilayah, pemerataan ekonomi, perbaikan kapasitas fiskal dan percepatan pencapaian target SPM.

#### **2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

##### **1. Disparitas Wilayah;**

Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (b) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; dan (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;

Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni baru, air minum layak, sanitasi (air limbah) layak; (b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70 persen APBD Kabupaten dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.

##### **1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;**

###### **a. Pemenuhan Layanan Dasar**

Isu peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti yang termuat dalam Bab II dokumen ini, tingkat partisipasi dalam PAUD masih cukup rendah. Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu disini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan.

Variabel kesehatan dipengaruhi oleh komponen medis dan non-medis, yaitu lingkungan sosial ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, intervensi penyelesaian masalah kesehatan juga memerlukan intervensi dari sektor di luar kesehatan, misalnya kebijakan sarana prasarana lingkungan, jaminan kesejahteraan sosial, komunitas siaga, dan sebagainya. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas untuk membentuk pola hidup bersih dan sehat perlu dibangun sebagai salah satu alternatif menjawab masalah kesehatan di masa mendatang. Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

b. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis bidang kependudukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Hak identitas hukum kependudukan menjadi hak semua penduduk. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana melayani administrasi bagi semua warga dengan tepat dan cepat. Terkait era dengan pengendalian penduduk adalah pengembangan kualitas penduduk sejak dari fondasi keluarga. Ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk sangat strategis untuk dikelola supaya daya dukung ruang dan lingkungan memadai untuk lingkungan layak huni. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Namun jika produktivitas ekonomi penduduk, dan ketahanan keluarga baik, maka dapat menjadi modal pembangunan yang kuat.

c. Kesetaraan gender, perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Dalam membangun sumber daya manusia, menempatkan kesetaraan gender menjadi prioritas untuk melindungi hak perempuan dan anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak dan perlindungan

anak, penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan, maka akan mendukung upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

d. Penguatan Keberdayaan Pemuda

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam men-dukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya.

Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk kemajuan zaman, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu sendiri. Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

**2. Ketenagakerjaan;**

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu tugas yang harus dikedepankan. Tantangan globalisasi revolusi industri 4.0 adalah penyesuaian kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan lapangan

**3. Kemiskinan;**

Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor yang menjadi andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Berdasarkan data BPS Tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 7,47 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 7,56 persen. Puncak kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim

investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

#### **4. Kebudayaan dan Karakter Bangsa;**

Daya saing sumber daya manusia yang berbasis pada nilai-nilai budaya menjadi fokus perhatian. Tantangan strategis adalah bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal yang termanifestasi dalam pola kebiasaan hidup sehari-hari, pengembangan seni dan industri kreatif berbasis budaya. Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas di masyarakat. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya. Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal dalam perkembangan kabupaten Sukoharjo masa kini.

#### **5. Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;**

##### **a. Kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah**

Infrastruktur konektivitas wilayah mencakup jalan raya, perhubungan, dan sarana prasarana komunikasi informasi. Disparitas atau ketimpangan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur tiap daerah. Beberapa penyebab ketimpangan wilayah antara lain, pertama, kondisi wilayah yang lebih menguntungkan/kurang menguntungkan secara ekonomi. Kedua, perbedaan kualitas kemampuan penduduk. Semakin tinggi kualitas kelompok masyarakat tertentu semakin tinggi potensi pendapatan dan pengeluaran masyarakat, sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi relatif tinggi. Sebaliknya, pertambahan penduduk yang tinggi dan kurang berkualitas akan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita Ketiga, perbedaan kecukupan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik akan mengganggu kurang

lancarnya mobilitas barang dan jasa. Keempat, perbedaan investasi dan alokasi dana pembangunan antar wilayah akan berpengaruh pada ragam fasilitas dan layanan publik, sehingga menambah ketimpangan wilayah. Ketimpangan infrastruktur dampak berdampak pada hambatan mobilitas sosial, sehingga menambah ketimpangan wilayah.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai enabler maupun katalisator dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui komponen smart people (masyarakat cerdas) dan aparatur yang cerdas, dan smart government (pemerintahan yang cerdas). Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana Memperkuat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan merata di seluruh wilayah sehingga tidak memperkecil kesenjangan antar wilayah;

b. Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Sehat

Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada keberlanjutan kesejahteraan penduduk kabupaten.

Tantangan yang perlu diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai, antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

**7. Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim.**

Pertumbuhan wilayah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang perlu diperhatikan adalah terkait kebersihan air, udara, tanah dari polusi.

Permasalahan strategis terkait dengan pencemaran dan lingkungan yaitu pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan limbah cair domestik yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian seperti industri dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana

pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air tanah.

Pencemaran udara dipengaruhi oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan alat elektronik kontributor kerusakan ozon dan jumlah kendaraan bermotor. Sumber pencemaran lingkungan lainnya adalah sampah. Persampahan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan yang beraktivitas sosial/ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan.

Lingkungan yang tidak dijaga juga berpotensi tidak tangguh menghadapi risiko bencana. Kesejahteraan masyarakat akan terganggu dengan kehadiran bencana. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi risiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu tantangan strategisnya adalah penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana.

Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, sosial, dan budaya jangan sampai membahayakan keberlanjutan lingkungan. Tantangannya adalah membangun lingkungan sehat dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana.

## **8. Kondusivitas Daerah dan Pelayanan Publik**

### a. Kondusivitas Daerah

Kesadaran masyarakat yang tinggi harus ditanamkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan berdampak

pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu kesbanglinmas, kantor polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir: (i) berbasis data evaluasi masa lalu; (ii) melakukan proyeksi dan target kinerja; (iii) kolaboratif dan inovatif lintas sektor dan lintas stakeholder. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berbasis sistem merit, mampu menciptakan pelayanan publik yang *agile* (lincah).

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan tata administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya website oleh perangkat daerah, terkait dengan updating dan penyediaaan data terkait kewenangan pemerintah kabupaten. Diperlukan akseleksi smart governance guna peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel memerlukan analisis pembangunan daerah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terbarukan, serta menghasilkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik.

Kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii) Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) Permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah; (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas-akademisi-media (*Pentahelix*) mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Isu penting untuk pemasaran (marketing) potensi daerah adalah mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur terutama daerah, diperlukan kontribusi pembangunan yang dapat diperoleh dari swasta atau yang disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs). Tantangan pemerintah dalam bagaimana menjaga kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kinerja pelayanan. Tantangan berikutnya adalah menggunakan secara efektif unit aduan yang mengelola dan menindaklanjuti setiap aduan yang diberikan oleh penerima layanan yang dalam hal ini adalah responden survei kepuasan masyarakat. peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan kolaborasi pemerintah dengan pilat pentahelix, yaitu: dunia usaha, forum komunitas, akademisi, media.

**BAB III****KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH****3.1. Kerangka Ekonomi Makro****3.1.1. Perekonomian Nasional**

Pada Triwulan I Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan proyeksi sejumlah ekonom, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 4,8%, lebih rendah dari capaian 5,05% pada Triwulan II 2024. Perlambatan ini disebabkan oleh berkurangnya stimulus fiskal, seperti bantuan sosial yang signifikan pada awal 2024, serta tekanan eksternal yang mempengaruhi permintaan ekspor dan investasi domestik.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan, meskipun mengalami moderasi akibat penurunan daya beli. Sementara itu, investasi menunjukkan pertumbuhan yang terbatas karena ketidakpastian global dan domestik. Ekspor mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global, sementara impor cenderung stabil. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi masih menjadi penopang utama pertumbuhan dari sisi lapangan usaha, meskipun dengan laju yang lebih moderat.

Inflasi nasional hingga Mei 2025 tetap terkendali dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar  $2,5\% \pm 1\%$ . Pada Januari 2025, inflasi *year-on-year (yoy)* tercatat sebesar 0,76%, sementara pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,09% *yoy*. Namun, pada Maret 2025, inflasi meningkat menjadi 1,65% *month-to-month (mtm)*, kelompok penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah. Secara keseluruhan, inflasi inti tetap stabil, mencerminkan ekspektasi inflasi yang terjaga dan permintaan domestik yang moderat.

Bank Indonesia memproyeksikan inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran target hingga akhir tahun, dengan perkiraan inflasi sebesar  $2,5\% \pm 1\%$  pada 2025. Stabilitas harga ini didukung oleh kebijakan moneter yang prudent dan koordinasi yang erat antara pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga kestabilan makroekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan rata-rata 5,6% hingga 6,1% dalam periode 2025–2029. Untuk mencapai target tersebut, strategi yang diambil meliputi peningkatan produktivitas total faktor, penguatan

investasi, serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan pengembangan sektor ekonomi baru.

Namun, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, termasuk ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan potensi gejolak pasar keuangan. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sementara tekanan inflasi dari sisi penawaran perlu diwaspadai. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter yang responsif serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sukoharjo, perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan dinamika perekonomian nasional. Hal ini mencakup penyesuaian target pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan sektor-sektor unggulan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan hingga Mei 2025 dan proyeksi ke depan, diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh sesuai target, didukung oleh stabilitas makroekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan sektor-sektor produktif. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi, guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1.2. Perekonomian Regional Jawa Tengah**

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 4,95% (*c-to-c*), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan permintaan ekspor. Namun, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan sumbangannya sebesar 33,84% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah.

Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,96% (*y-on-y*) dan 0,48% (*q-to-q*), menunjukkan stabilitas pertumbuhan meskipun dalam kondisi global yang menantang. Sektor administrasi pemerintahan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,23%, mencerminkan peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Hingga Mei 2025, data pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan sebelumnya dan kondisi ekonomi nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah akan berada pada kisaran 4,8% hingga 5,0% pada Triwulan I 2025. Faktor-faktor

seperti stabilitas inflasi, peningkatan investasi, dan program-program pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ini.

Inflasi di Jawa Tengah hingga Mei 2025 tetap terkendali, berada dalam kisaran target nasional sebesar  $2,5\% \pm 1\%$ . Stabilitas harga ini didukung oleh pasokan pangan yang memadai dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan otoritas moneter dalam menjaga kestabilan harga.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp105,72 triliun untuk tahun 2025, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp35,31 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp70,41 triliun. Alokasi ini diharapkan dapat mendukung program-program prioritas daerah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan renovasi sekolah.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang menetapkan sasaran pokok dan arah pembangunan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai penopang pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan hingga Mei 2025 dan proyeksi ke depan, diharapkan perekonomian Jawa Tengah dapat tumbuh sesuai target, didukung oleh stabilitas makroekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan sektor-sektor produktif. Pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi, guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1.3. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo**

Perekonomian Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2021–2024, mencerminkan pemulihan yang konsisten pasca kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Berdasarkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo pada 11 April 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini berhasil pulih dan tumbuh secara positif selama periode tersebut.

Struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh sektor industri pengolahan, yang berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah. Kombinasi sektor-sektor ini mencerminkan karakteristik ekonomi Sukoharjo yang berbasis pada industri manufaktur dan aktivitas perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen terbesar dalam PDRB Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif stabil. Investasi juga menunjukkan tren peningkatan, didorong oleh perbaikan iklim usaha dan berbagai program pemerintah daerah yang mendukung sektor produktif. Ekspor dan impor daerah mengalami fluktuasi, sejalan dengan dinamika perekonomian nasional dan global.

Inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2024 tercatat dalam kisaran yang terkendali. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi tahunan (*year-on-year*) pada Desember 2024 berada pada level yang moderat, mencerminkan stabilitas harga di daerah ini. Stabilitas inflasi ini didukung oleh pasokan barang yang memadai dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pelaku ekonomi.

Memasuki tahun 2025, perekonomian Kabupaten Sukoharjo diperkirakan akan melanjutkan tren pertumbuhan positif. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan regional, serta berbagai program pembangunan yang direncanakan, pertumbuhan ekonomi daerah ini diproyeksikan berada dalam kisaran 5,3-5,94 % pada akhir tahun 2025. Faktor-faktor pendukung pertumbuhan ini antara lain peningkatan investasi, penguatan sektor industri, dan stabilitas konsumsi rumah tangga.

Namun, sejumlah tantangan perlu diantisipasi, termasuk potensi dampak dari ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas fiskal, memperkuat koordinasi antar sektor, dan mendorong inovasi dalam pembangunan ekonomi.

Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Upaya bersama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat infrastruktur ekonomi akan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah perlu disusun secara adaptif dan responsif terhadap dinamika perekonomian, guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 3. 1 Capaian dan Proyeksi Indikator Perekonomian Daerah Kabupaten Sukoharjo**

No	Indikator	Capaian 2024	Proyeksi	
			RKPD 2025	P RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97	5,3-5,94	5,3-5,94
2	Inflasi (%)	3±1	3±1	3±1
3	Nilai Investasi PMDN/PMA (Juta)	932.082,6	969.365,8	969.365,8
4	Tingkat Penganguran Terbuka (%)	3,65	4,0-3,4	4,0-3,4
5	Angka Kemiskinan (%)	7,47	7,3-7,1	7,3-7,1
6	Pendapatan Per Kapita (juta)	53,08	49,909	54,00

Sumber: Bapperida (data diolah)

### 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka pendanaan tahun 2025 secara keseluruhan sampai dengan triwulan I terjadi perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan pendapatan asli daerah dan pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang berdampak pada kerangka pendanaan.

#### 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

proyeksi pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yang merupakan hasil revisi terhadap dokumen RKPD dan APBD Tahun 2025. Proyeksi ini disusun untuk menggambarkan kemampuan riil pendapatan daerah yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan anggaran belanja dan pembiayaan. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan aktual perekonomian daerah, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap struktur pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Analisis berikut menggambarkan dinamika perubahan proyeksi pendapatan tersebut secara rinci.

Selanjutnya proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (dalam ribuan)**

KODE	URAIAN	RKPD	ABBD 2025	P RKPD 2025
1	2	3	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.077.559.624.070</b>	<b>2.129.806.028.009</b>	<b>2.141.340.488.718</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>548.575.639.070</b>	<b>562.314.237.237</b>	<b>568.960.578.946</b>
4.1.01	Pajak Daerah	357.900.000.000	355.012.627.000	352.251.119.000
4.1.02	Retribusi Daerah	109.496.803.000	113.938.009.694	121.673.057.224
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.047.442.000	42.607.000.568	44.252.244.863
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.131.394.070	50.756.599.975	50.784.157.859
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.525.983.985.000</b>	<b>1.567.491.790.772</b>	<b>1.572.379.909.772</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.436.642.000	1.461.945.350.000	1.450.324.469.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.547.343.000	105.546.440.772	122.055.440.772
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.077.559.624.070</b>	<b>2.129.806.028.009</b>	<b>2.141.340.488.718</b>

Sumber: BPKPAD dan BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data perubahan RKPD 2025, terdapat peningkatan total pendapatan daerah dari semula Rp2.077.559.624.070 dalam dokumen RKPD awal menjadi Rp2.141.340.488.718 dalam Perubahan RKPD 2025. Ini mencerminkan adanya penyesuaian pendapatan sebesar Rp63,78 miliar (sekitar 3%). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap nihil, sama seperti pada dokumen ABBD 2025.

PAD mengalami peningkatan dari Rp548,58 miliar dalam RKPD awal menjadi Rp568,96 miliar dalam Perubahan RKPD, naik sekitar Rp20,38 miliar. Kenaikan signifikan terlihat pada komponen Retribusi Daerah yang bertambah sekitar Rp12,18 miliar, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang meningkat Rp12,2 miliar dari sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, yang bisa berasal dari peningkatan tarif, cakupan objek pajak/retribusi, atau efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Pendapatan transfer sebagai komponen terbesar juga mengalami kenaikan dari Rp1.525 triliun menjadi Rp1.572 triliun. Kenaikan tertinggi terjadi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang melonjak dari Rp86,54 miliar menjadi Rp122,05 miliar. Sementara Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga naik meskipun lebih moderat, yaitu sekitar Rp10,88 miliar. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi dana transfer, baik dari kebijakan pusat maupun mekanisme dana bagi hasil antar daerah. Penyesuaian pendapatan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kembali prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2025.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah antara lain:

- a. Optimalisasi pungutan PAD, melalui:
  - 1) Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - 2) Mengupayakan dan membangun sumber-sumber pendapatan baru;
  - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
  - 4) Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
- b. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- c. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;

- d. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2025 tetap diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Selanjutnya arah kebijakan belanja dalam perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yaitu:
  - a. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata;
  - b. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif;
  - c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif;
  - d. Pengurangan Kemiskinan;
  - e. Penguatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana.
2. Arah kebijakan pembangunan daerah di atas disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita dan mendukung isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
  - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
  - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
  - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
  - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
  - f. Dukungan swasembada pangan; dan
  - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif dan masukan masyarakat;

Berikut proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3 Proyeksi Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025  
(dalam ribuan)**

KODE	URAIAN	RKPD	ABBD 2025	P RKPD 2025
1	2	3	3	4
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.156.559.624.070</b>	<b>2.212.806.028.009</b>	<b>2.298.906.768.740</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.664.252.892.754</b>	<b>1.714.144.721.791</b>	<b>1.725.240.298.462</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	978.196.074.273	963.076.119.041	966.235.715.141
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.626.361.908	696.629.948.677	694.928.009.248
5.1.04	Belanja Subsidi	756.864.073	756.864.073	756.864.073
5.1.05	Belanja Hibah	33.843.039.500	46.336.790.000	48.406.710.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.830.553.000	7.345.000.000	14.913.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>136.593.115.355</b>	<b>161.633.619.072</b>	<b>178.596.506.383</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.337.074.855	46.806.135.762	56.935.721.073
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.418.409.000	38.132.881.000	41.045.490.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.396.945.500	73.299.080.500	77.217.773.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.285.686.000	3.340.521.810	3.340.521.810
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000	55.000.000	57.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.808.184.644</b>	<b>6.971.212.146</b>	<b>5.051.612.893</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.808.184.644	6.971.212.146	5.051.612.893
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>342.905.431.317</b>	<b>330.056.475.000</b>	<b>390.018.351.002</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.206.562.100	27.206.562.000	27.206.562.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	320.698.869.217	302.849.913.000	362.811.789.002
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.156.559.624.070</b>	<b>2.212.806.028.009</b>	<b>2.298.906.768.740</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-79.000.000.000</b>	<b>-83.000.000.000</b>	<b>-157.566.280.022</b>

Sumber: BPKPAD dan BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 (data diolah)

Dalam konteks peningkatan total belanja daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 yang mencapai Rp2.298 miliar dalam Perubahan RKPD, perlu dicermati bahwa perubahan tersebut juga merupakan respons terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah. Surat edaran ini menegaskan perlunya pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja operasional serta mengarahkan belanja daerah pada program prioritas nasional dan daerah yang bersifat produktif serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kabupaten Sukoharjo tampaknya telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penurunan Belanja Pegawai dan efisiensi pada Belanja Tidak Terduga, serta tetap mempertahankan Belanja Barang dan Jasa yang mendukung pelayanan publik.

Berdasarkan data perubahan RKPD 2025, total belanja daerah mengalami peningkatan signifikan dari RKPD awal sebesar Rp2.156.559.624.070 menjadi Rp2.298.906.768.740 dalam Perubahan RKPD. Kenaikan ini sebesar Rp142,3 miliar atau sekitar 6,6%. Komponen utama yang mendorong peningkatan ini adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal, yang masing-masing meningkat Rp61,0 miliar dan Rp42,9 miliar dibandingkan RKPD awal. Sementara Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan signifikan, menunjukkan pergeseran dari penganggaran kontinjensi ke pengeluaran yang lebih terarah.

Belanja Operasi, yang merupakan komponen terbesar, naik dari Rp1,66 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Subkomponen yang mengalami kenaikan mencolok adalah Belanja Bantuan Sosial, dari Rp6,83 miliar menjadi Rp14,91 miliar, atau naik 118%. Sementara itu, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa tetap mendominasi dengan alokasi masing-masing di atas Rp690 miliar, meskipun terjadi sedikit penyesuaian. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan layanan publik sekaligus merespons kebutuhan sosial masyarakat.

Pada sisi lain, Belanja Modal juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp136,6 miliar dalam RKPD awal menjadi Rp178,6 miliar dalam perubahan. Kenaikan paling besar terlihat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang meningkat lebih dari Rp17,5 miliar, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, yang naik Rp7,8 miliar. Sementara Belanja Transfer, terutama untuk Bantuan Keuangan, juga naik cukup besar dari Rp320,6 miliar menjadi Rp362,8 miliar. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran semakin melebar menjadi Rp157,6 miliar dalam Perubahan RKPD, yang kemungkinan akan ditutup melalui pemberian daerah atau SiLPA tahun sebelumnya.

Perubahan RKPD ini secara keseluruhan menunjukkan penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih terfokus pada belanja produktif dan prioritas strategis daerah, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan yang berbasis pada hasil evaluasi kinerja, arah kebijakan nasional, serta transisi ke arah RPJMD 2025–2029.

### **3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD TA. 2024. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah maka dilakukan penyesuaian/penundaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 saat ini diarahkan fokus pada penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu untuk menutup defisit anggaran. Selanjutnya proyeksi pembiayaan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (dalam ribuan)**

KODE	URAIAN	RKPD	ABBD 2025	P RKPD 2025
1	2	3	3	4
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>174.566.280.022</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000	100.000.000.000	174.566.280.022
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>79.000.000.000</b>	<b>83.000.000.000</b>	<b>157.566.280.022</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber: BPKPAD dan BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data Perubahan RKPD 2025, terjadi peningkatan signifikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dari semula Rp100 miliar menjadi Rp174,57 miliar. Seluruh penerimaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang mengalami kenaikan sebesar Rp74,57 miliar atau sekitar 74,6%. Tidak terdapat pencairan dana cadangan, sehingga SiLPA menjadi satu-satunya sumber pembiayaan daerah. Kenaikan ini berperan penting dalam menutup defisit anggaran yang juga meningkat dalam perubahan RKPD 2025.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan tetap konsisten sebesar Rp17 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah, tanpa perubahan dibandingkan dengan ABBD maupun RKPD awal. Dengan demikian, Pembiayaan Netto dalam perubahan RKPD 2025 naik drastis menjadi Rp157,57 miliar dari Rp79 miliar di RKPD awal. Besarnya pembiayaan netto ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah seiring meningkatnya total belanja, sekaligus mengindikasikan adanya SiLPA tahun sebelumnya yang cukup besar dan dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan tahun berjalan.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan hasil evaluasi capaian RKPD berjalan, memperhatikan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta penyelarasan dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Di samping itu, perubahan juga dilakukan untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta menyesuaikan arahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2025-2029 yaitu:

#### **“SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT”**

Dalam mewujudkan visi “Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat” diimplementasikan melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) Serta Layanan Publik yang Berkualitas;
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender;
- 3) Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif;
- 4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan;
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tetap mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang masih berlaku secara formal, sembari mulai memperhatikan substansi dan arah strategis dari Rancangan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran pembangunan yang digunakan dalam dokumen perubahan ini masih berdasarkan rumusan yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026,

guna menjaga kesinambungan pencapaian pembangunan daerah, efektivitas evaluasi kinerja, serta konsistensi indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tahun 2025 diposisikan sebagai tahun transisi yang strategis untuk memastikan keterpaduan antara capaian akhir RPJMD lama dan arah kebijakan baru kepala daerah terpilih, dalam rangka mendukung perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun 2025	
						Target RKPd	Target P RKPd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi						
		Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	79	86,04
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	85
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,84	4,45
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB	BB
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,758	1,067
				Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III	III
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	87	99,36
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas						
		Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,00	79,5
				Angka Kemiskinan	%	7,3-7,1	7,3-7,1
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,86	78,02
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,38	10,1
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,87	13,94

#### IV-3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun 2025	
						Target RKPd	Target P RKPd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,69	0,60
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97	97,88
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	56	61
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	32	52,25
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,05	4,37
				Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,7	2,34
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi						
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,94	5,3-5,94
				Tingkat Pengangguran Terbuka (PTP)	%	4,0-3,4	4,0-3,4
				Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	49,909	54,00
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	15	31,66
				Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	3,7	6,1
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,6	5,4
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	6,4	6,06
				Pertumbuhan investasi	%	24	24
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	3	3
				Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	93,9
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	85	85
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7656	0,7656
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan						

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
						<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	71,09	73,80
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,41	63,60
				Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	81,29	64,18
		Meningkatnya kualitas infrastruktur		Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	87,76	91,64
				Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	71,24	71,24
				Indeks Fatalitas	Angka	0,252	0,065
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	88	100
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51,25	52,73
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,25	89,48
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09	32,68
				Indeks Kapasitas Daerah	Nilai	0,45	0,63
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan						
		Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Percentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	88,37	88,37
				Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,88
				Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan daerah di atas disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita dan mendukung isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan

7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang inklusif dan berdaya saing berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang didukung dengan Profesionalitas ASN, dan kolaborasi yang inklusif.

#### **4.2.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kapasitas Desa
  - a. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintahan desa.
  - b. Percepatan digitalisasi tata kelola hingga tingkat desa.
  - c. Penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui sosialisasi produk hukum daerah.
  - d. Penyelarasan misi Bupati dalam dokumen Renstra perangkat daerah.
2. Penguatan Ekonomi Daerah dan Kemandirian UMKM
  - a. Penguatan ekonomi inklusif melalui program unggulan: smart farming, UMKM naik kelas, revitalisasi infrastruktur pertanian, desa wisata berkelanjutan, dan ketahanan pangan.
  - b. Dukungan terhadap program Sukoharjo Go Global dan penguatan rantai pasok produk lokal.
  - c. Optimalisasi peran BUMD dalam mendukung PAD dan program prioritas ekonomi lima tahun ke depan.
3. Infrastruktur, Penataan Wilayah, dan Pengelolaan Lingkungan

- a. Prioritas pembangunan eks Terminal Kartasura, penataan wajah kota dan kabel optik, serta pemanfaatan Waduk Mulur sebagai kawasan wisata.
  - b. Penanganan TPA Mojorejo melalui sistem RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai solusi pengelolaan sampah dan sumber PAD baru.
  - c. Perencanaan pembangunan sarana olahraga (GOR Indoor, kolam renang, lapangan tenis), serta peningkatan sarpras pasar, khususnya Pasar Kartasura.
4. Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Sosial
- a. Penyempurnaan pelaksanaan program Beasiswa Sukoharjo Pintar dengan basis data DTKS yang valid dan seleksi yang adil.
  - b. Dukungan terhadap program Sekolah Efektif/SD Unggulan, regrouping sekolah, dan peningkatan kualitas SD negeri.
  - c. Penguatan koordinasi program umroh gratis untuk takmir masjid dan penyediaan rumah layak huni.
5. Sinkronisasi Program Prioritas dan Evaluasi Kinerja
- a. Penyusunan RPJMD 2025–2029 harus selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan memperhatikan 10 indikator kinerja utama (IKU) daerah.
  - b. Penguatan perencanaan berbasis kinerja melalui pemanfaatan Indeks Kinerja Daerah (IKD) dan sistem akuntabilitas (SAKIP).
  - c. Perlunya jadwal reses disinergikan dengan siklus Musrenbang agar Pokok Pikiran DPRD terakomodasi secara efektif dalam RKPD.

#### **4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025**

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 diarahkan pada “**“Perwujudan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata**, dengan fokus pada:
  - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, penanganan *stunting* dengan target sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 - 59 bulan, didukung penguatan sistem

- kesehatan daerah, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, keterjangkauan pemberian kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar;
- b. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan budaya literasi dan internalisasi nilai-nilai luhur bangsa;
  - c. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - d. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka;
  - e. Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan peningkatan intensitas penyelenggaraan *event* olahraga dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;
  - f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, penguatan forum kebudayaan, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dan sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Pemuda. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- 6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 8) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 9) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- 10) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- 12) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 13) Program Perlindungan Khusus Anak
- 14) Program Perlindungan Perempuan
- 15) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
- 16) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
- 17) Program Pengendalian Penduduk
- 18) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 19) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 20) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 21) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 22) Program Pembinaan Sejarah
- 23) Program Pengembangan Kebudayaan
- 24) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
- 25) Program Pembinaan Perpustakaan

**2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif**, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui: 1) Peningkatan kemampuan petani dalam budaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; 2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; 3) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tumpungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya; 4) Peningkatan Indeks Pertanaman Padi 400 (IP Padi 400) 5) Pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming*; 6) Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
- b. Penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui: Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha, pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
- c. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mencakup : 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Meningkatkan

- akses pemberdayaan bagi wirausaha; 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; dan 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial;
- d. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
  - e. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi;
  - f. Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencakup: 1) Peningkatan promosi dan pemberdayaan pariwisata serta membangun database ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif yang berdaya saing, 3) Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif dan kondusif, 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pelestarian, kemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - g. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau, mencakup : (1) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian; dan (3) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian; (4) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian.
  - h. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
  - i. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Per Kapita. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Hubungan Industrial
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 5) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 6) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 7) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 8) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- 9) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 10) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 11) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- 12) Program Penataan Desa
- 13) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- 14) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 15) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- 16) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- 17) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- 18) Program Pengembangan Ummkm
- 19) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- 20) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 21) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 22) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 24) Program Promosi Penanaman Modal
- 25) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- 26) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 27) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 28) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 29) Program Pemasaran Pariwisata
- 30) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 31) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 32) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 33) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 34) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 35) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 36) Program Penyuluhan Pertanian
- 37) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 38) Program Pengembangan Ekspor
- 39) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 40) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 41) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- 42) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 43) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 44) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- 45) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 46) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- 47) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 48) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

**3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif**, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*);
- b. Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan *human capital management*; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;
- d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui 1). Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; 2) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
- e. Peningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- f. Peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;
- g. Peningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- h. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;
- i. Perluasan kerjasama antar regional daerah dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi dan percepatan pencapaian target SPM;
- j. Perluasan kerjasama dengan dunia usaha melalui pengembangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSPL (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan;
- k. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2025 dengan fokus kajian teknokratik dan penyusunan dokumen.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pencatatan Sipil
5. Program Pendaftaran Penduduk
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
8. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
9. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
10. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

11. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
12. Program Pengelolaan Arsip
13. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
14. Program Perekonomian Dan Pembangunan
15. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
16. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
17. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
19. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Program Kepegawaian Daerah
23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
24. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
25. Program Penyelenggaraan Pengawasan
26. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
27. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
28. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
29. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
30. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
31. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
32. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
33. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
34. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
35. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

**4. Pengurangan Kemiskinan**, dengan fokus kepada:

- a. Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin, melalui layanan akses rumah layak huni, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat;
- b. Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta

- penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- d. Penguatan dan Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, melalui: pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian bantuan sarana produksi bagi UMKM dan pelatihan *e-commerce* bagi UMKM serta penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;
  - e. Penanganan kemiskinan pada 36 Desa/Kelurahan Prioritas melalui program/kegiatan yang dilakukan secara konvergen.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Angka Kemiskinan. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Penanganan Bencana
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 7) Program Rehabilitasi Sosial
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 9) Program Penanggulangan Bencana
- 10) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 11) Program Pencatatan Sipil
- 12) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 13) Program Pendaftaran Penduduk
- 14) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 15) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- 16) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 17) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- 18) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 19) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- 20) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- 21) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- 22) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 23) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 24) Program Pengelolaan Pendidikan
- 25) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 26) Program Perlindungan Perempuan
- 27) Program Pengendalian Penduduk
- 28) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 29) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- 30) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- 31) Program Hubungan Industrial
- 32) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 33) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 34) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 35) Program Pembinaan Perpustakaan
- 36) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 37) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 38) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 39) Program Penyuluhan Pertanian
- 40) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 41) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 42) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 43) Program Pengembangan Perumahan
- 44) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- 45) Program Kawasan Permukiman
- 46) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

**5. Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana**, dengan fokus kepada:

1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penataan infrastruktur antar wilayah dan daerah perbatasan (jalan, jembatan, drainase, irigasi) serta penataan wajah kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ada;
2. Peningkatan kompetensi jasa konstruksi;
3. Peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
4. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh;
5. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi;
6. Penunstasan Infrastruktur TIK, Pemanfaatan Infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung transformasi digital;
7. Meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran air, tanah dan udara serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan;
8. Penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat,

serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana (IRB). Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan
- 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 9) Program Kawasan Permukiman
- 10) Program Pengembangan Perumahan
- 11) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- 12) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 13) Program Penanggulangan Bencana
- 14) Program Penatagunaan Tanah
- 15) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 16) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 17) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- 18) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 19) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 20) Program Pengelolaan Persampahan
- 21) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 22) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 23) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 24) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 25) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 26) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- 27) Program Pengelolaan Pelayaran
- 28) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 29) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Rencana pembangunan daerah tahun 2025 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 yaitu:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas, melalui:
  - a. *Sukoharjo Digital Government* (Tol Layanan Publik);
  - b. *Sukoharjo Smart Village Program* (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan);
  - c. Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK);
  - d. Reformasi Birokrasi Dinamis (*Dynamic Bureaucracy Reform*);
  - e. *Sukoharjo Open Government (SOG)*.
2. Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, melalui:
  - a. Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar;
  - b. Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD;
  - c. Posyandu Terpadu (*One Stop Health Center*) untuk Integrasi Layanan Primer;
  - d. Santunan Kematian (Program Lanjutan);
  - e. Pencegahan dan Penanganan Stunting;
  - f. Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS);
  - g. Sukoharjo Berkarakter;
  - h. Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus;
  - i. Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS);
  - j. Sukoharjo Pemuda Produktif;
  - k. Sukoharjo Juara;
  - l. Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo).
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, dengan fokus pada pembukaan lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi kemiskinan, melalui:
  - a. *Smart Farming*;
  - b. UMKM Naik Kelas;
  - c. Desa Wisata Berkelanjutan;
  - d. Investasi Berbasis Potensi Lokal;
  - e. Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (*Sukoharjo Go Global*);
  - f. Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas;
  - g. Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal;
  - h. Subsidi Bunga Pinjaman UMKM;
  - i. Program Asuransi Pertanian;
  - j. Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga;
  - k. Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian.

4. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, melalui :
  - a. Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus;
  - b. Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho);
  - c. Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi;
  - d. Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh;
  - e. Terangi Jalanku;
  - f. "Sukoharjo Sehat": Akses Air Minum dan Sanitasi Layak;
  - g. "Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi;
  - h. Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK;
  - i. Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana;
  - j. Penyediaan Rumah Layak Huni;
5. Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan, melalui:
  - a. Umroh Gratis untuk Takmir Masjid;
  - b. Sukoharjo Mengaji;
  - c. Sukoharjo Harmoni;
  - d. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren;
  - e. Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan

### **4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

#### **4.3.1. Indikator Kinerja Utama Daerah**

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 yang meliputi:

**Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025**

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPD 2025	Target P RKPD 2025
1	2	3	4	5
1	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	79	86,04
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79	79,5
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97	97,87
4	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	56	60,85
5	Angka Kemiskinan	%	7,3-7,1	7,3-7,1
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,94	5,3-5,94
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,0-3,4	4,0-3,4
8	Pendapatan perkapita	Jt Rp	49,909	54,00
9	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	71,09	73,80

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPd 2025	Target P RKPd 2025
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,41	63,60
11	Indeks Resiko Bencana	Nilai	81,29	64,18
12	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	88,37	88,37

#### 4.3.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut IKU Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPd Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025:

**Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025**

Kode (1)	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran) (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Tahun 2025	
				Target RKPd (7)	Target P RKPd (8)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	T	9,38	10,1
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	T	13,87	13,94
1.1	Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75	79
1.2	Meningkatnya kualitas dan Akses pendidikan masyarakat	Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	75,22	92,62
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,94	96,36
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat . 4.1.1.(e)	%	81,6	81,6
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat . 4.1.1.(d)	%	105,44	104,29
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat . 4.1.1.(e)	%	105,03	105,03
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
		Capaian SPM Pendidikan	%	96,9	100
1.3	Meningkatnya profesionalisme Pendidik	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	97,74	97,74

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPD</b>	<b>Target P RKPD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
2	Terwujudnya kearifan budaya local	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terlayani	%	50	60
2.1	Meningkatnya pengembangan Kesenian, nilai budaya dan Pelestarian situs, Cagar Budaya dan budaya Lokal	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	13	13
		Persentase Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	%	55	72,22
		Warisan Budaya yang dilestarikan	bah	1	2
		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	bah	109	174
Dinas Kesehatan					
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat	Angka Harapan hidup	tahun	77,85	78,10
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	93
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	7	7
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	8,2	8,2
		Persentase Stunting	%	7,55	7,55
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	95
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	72	72
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	54	54
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	angka	78,00	78,00
Rumah Sakit Umum Daerah					
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Nett Death Rate (NDR)	permil	30	30
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	78	78
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Terwujudnya kualitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	indeks	71,24	69,25
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur publik,sarana dan prasarana dasar masyarakat	Akses air minum yang layak	%	100	94,31
		Akses layanan Sanitasi	%	100	96,05
		Rasio Jaringan Irigasi	%	55	55
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8,05	8,02
		Rasio bangunan sesuai ketentuan	%	27,4	27,06

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	88,35	88,35
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	70	70
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76	76
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan permukiman	Persentase Lingkungan Hunian Layak	%	87,76	91,6
1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPM Perumahan Rakyat	Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	100	100
1.2	Meningkatnya RTLH menjadi RLH	Prosentase penuhan rumah yang layak	%	35,60	32,9
1.3	Meningkatnya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	33,35	33,35
1.4	Meningkatnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dan Tertangani dengan baik	%	84,12	89,99
1.5	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	91,88	91,88
Satuan Polisi Pamong Praja				97,6	97,6
1	Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	98,5	98,5
1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan per UU daerah, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta meningkatnya kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah	%	60	60
		Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	%	95,6	95,6
		Persentase anggota Satlinmas terlatih	%	75	75
		Persentase Tanggap Kebakaran (Respon Time)	%	91,88	91,88
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	97,6	97,6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Terwujudnya Lingkungan sehat, aman tangguh berkelanjutan	Indeks Kapasitas Daerah	nilai	0,45	0,64
1.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	%	94	64,13
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	65	73,5
Dinas Sosial					
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,05	5,1
		Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,7	2,34
1.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	14,31	14,31

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1.2	Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	86,47	86,47
		Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		86,47	86,47
1.3	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100	100
		Jumlah taman makam pahlawan dalam kondisi baik		1	1
1.4	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	72,92	72,92
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	96,96	97,80
1.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	79,16	79,21
1.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap anak	Rasio	1:6100	1:4990
		Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	1:11150	1:9150
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,69	0,60
2.1	Menurunnya Angka Kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,67	1,67
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	4,7	4,50
2.2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Umur	22	22
2.3	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	64,58	72,13
Dinas Pangan					
1	Terwujudnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	93,9
1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Tingkat Konsumsi Energi (Kalori)	%	98,4	98,4
		Tingkat Konsumsi Protein	%	99,82	99,82
		Penguatan Cadangan Pangan	%	31	99,75
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	3,59	3,59
		Ketersediaan Bidang Pangan utama	%	226,9	268,4
		Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	%	91,11	91,11
1.2	Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80	80
Dinas Lingkungan Hidup					

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	51,25	51,25
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	87,25	87,25
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	31,09	31,09
1.1	Meningkatnya standar kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)	%	70	70
		Prosentase timbunan sampah yang dikelola (LH)	%	99	99
		Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	38,63	38,63
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	64	64
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
1	Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Adminduk	nilai	84	84
1.1	Meningkatnya Kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75	75
1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase terlanyarnya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100
		Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	j	1	6
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Terwujudnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	nilai	0,7656	0,7946
1.3	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80	80
1.4	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Berdirinya Bumdes	%	100	100
		Persentase Desa Mandiri	%	28	40,67
1.5	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina	%	100	100
Dinas Perhubungan					
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	angka	0,292	0,185
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0,75	0,75
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	24,5	18
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	77	77

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	Terwujudnya Tata Kelola dan Ekosistem E-Government	Nilai Indeks Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3,85	4,45
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	78	78
1.4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Indek KAMI	nilai	450	450
1.5	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Prosentase/cakupan data statistik sektoral	%	95,59	95,59
1.2	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	nilai	95	99,38
1.3	Meningkatnya kualitas Layanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3,92	4,76
2	Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	nilai	3,65	4,3
2.1	Cakupan Infrastruktur TI	Cakupan Infrastruktur TI	%	88	100
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan					
1	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	%	3,6	6,1
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	15	31,66
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,4	5,4
1.1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi aktif	%	84	42,2
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25	25
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,63	99,75
1.2	Meningkatnya Wira Usaha Baru	Presentase Wirausaha Baru yang mempunyai NIB	%	4,69	9,57
1.3	Meningkatnya Kualitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Non- Migas	%	0,45	15,46
		Persentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	1,5	0
		Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	96,1	96,1
		Persentase Pasar Tertib Ukur	%	46,1	57,7
1.4	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75	75,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	85	85
1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	nilai	85	85
2	Tercapainya Pertumbuhan Investasi	Pertumbuhan investasi	%	24	20
2.1	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	%	100	90
2.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76	74
Dinas Kepemudaan dan Olahraga/ Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
1	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	49,01	61
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74	78
1.2	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Cakupan pemberdayaan pemuda	%	14.50	14,56
1.3	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan prestasi olahraga	%	53	58
2	Terwujudnya Destinasi Wisata yang berdaya saing	Persentase Destinasi Wisata yang Berdaya Saing	%	67,50	67,5
2.1	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	28,89	28,89
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
1	Terwujudnya penyelenggaran kearsipan yang tertib dan peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	24	24
		Indeks Manajemen Kearsipan	indeks	58	62,5
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	85	75
1.3	Meningkatnya kualitas tata kelola karsipan	Pengawasan Karsipan Internal	nilai	24	27,75
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Perpustakaan	Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	44	51
Dinas Pertanian dan Perikanan					
1	Terwujudnya Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	rata-rata Prosentase Pertumbuhan Produksi sektor Pertanian	%	1,89	1,89
		Prosentase Pertumbuhan Nilai produksi perikanan (%)	%	2,79	2,79
		Prosentase Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%)	%	2,08	2,08
1.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Padi, Jagung, Kedelai dan Produksi pada Komoditas Pertanian Utama	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	69,72	69,72
		Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	79,65	79,65
		Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	18,94	18,94
		Peningkatan Produksi Padi (Ton)	ton	8385,82	8385,82
		Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	ton	331,61	331,61

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	ton	51,12	51,12
		Peningkatan Produksi bawang merah (ku)	ku	5,95	5,95
		Peningkatan Produksi Cabe (ku)	ku	10,67	10,67
		Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	ton	5	5
		Peningkatan Produksi Tebu	ton	25,71	25,71
		Peningkatan Produksi Pisang (ku)	ku	11	11
		Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	ton	6,034	6,034
1.3	Meningkatnya Produksi Daging dan telur yang berkualitas	Peningkatan Produksi Daging (Ton)	ton	163,44	163,44
		Prosentase Daging ASUH	%	93,2	93,2
1.4	Meningkatnya Produksi Perikanan dan nilai produksi Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	ton	421,57	421,57
		Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)	ton	276632	276632
1.5	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	0,5	0,5
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	poin	78	78
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
1	Terwujudnya pertumbuhan Produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	%	85	85
1.1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	angka	20909	20.909
1.2	Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Capaian Nilai SAKIP	poin	79,05	79,05
2	Terwujudnya pertumbuhan produktivitas PDRB sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,06	6,06
2.1	Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	40,5	40,5
Sekretariat Daerah					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	84	84
		Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	87	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	75	75
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100
		Cakupan perumusan dan	%	100	100

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan			
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79	79
Sekretariat DPRD					
1	Terwujudnya Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sukoharjo	Indek Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan Masyarakat Yang Sasarannya DPRD)	angka	78	80
1.1	Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Legislasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Legislasi	angka	78	80
1.2	Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Penganggaran dan Pengawasan	angka	78	80
1.3	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76	76
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah					
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbang yang Berkualitas	Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	96	96
1.1	Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	75	75
1.2	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	%	96	96
1.3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbang	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	50	50
1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	nilai	77	77
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah					
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan aset yg transparan dan akuntabel	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	angka	1,646	1,646
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LHP BPK atas LKPD	kategori	4	4
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	70	70
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
1	Mengimplementasikan Manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Indeks Sistem Merit	indeks	II	III

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	75	75
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	%	90,25	90,25
		Persentase Pengembangan ASN	%	86	86
Inspektorat Daerah					
1	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Profesional Melalui Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif	Nilai Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	point	10	10
1.1	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3
1.2	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka		
Kecamatan Weru					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89	89
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	66	66
Kecamatan Bulu					
3	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	82	86,63
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
3.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	61	61
Kecamatan Tawangsari					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89	
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	68	
Kecamatan Sukoharjo					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	88,5	88,5
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	68	68
Kecamatan Nguter					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	93	90

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPD</b>	<b>Target P RKPD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	64	64
Kecamatan Bendosari					
3	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	88	90
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
3.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	68	68
Kecamatan Polokarto					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89	89
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas Aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	63	63
Kecamatan Mojolaban					
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89	89
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	67	67
Kecamatan Grogol					
3	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	88	88
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
3.2	Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	65	
Kecamatan Baki					
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	85	89
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	67	
Kecamatan Gatak					
1	Terwujudnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	84	86
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	68	80
Kecamatan Kartasura					

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2025</b>	
				<b>Target RKPd</b>	<b>Target P RKPd</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	84,5	84,5
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur Dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	nilai	65	65
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Terwujudnya kesatuan bangsa dan bernegara	Presentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85	85
1.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila	Presentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	%	92	92
1.2	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat;	Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	80	80
1.3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama	Presentase kegiatan kerukunan umat beragama	%	83	83
1.4	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80	80

#### 4.3.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Indikator tersebut tertuang ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>		<b>Penanggung Jawab</b>
				<b>RKPd</b>	<b>P RKPd</b>	
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,9-5,3	4,9-5,3	SEKRETARIAT DAERAH
2		Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	47,362	49,900	SEKRETARIAT DAERAH
3		Angka kemiskinan	%	7,6-7,4	7,6-7,4	SEKRETARIAT DAERAH
4		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,06	78,66	SEKRETARIAT DAERAH
5		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,37	9,85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
6		Angka usia harapan hidup	Tahun	77,8	77,87	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
7		Tingkat pengangguran terbuka	%	4,57-4,48	4,57-4,48	SEKRETARIAT DAERAH
8		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83	SEKRETARIAT DAERAH
9		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	SEKRETARIAT DAERAH
10		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,8	93,8	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
11		Penguatan cadangan pangan	%	29	29	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
12		Penanganan daerah rawan pangan	%	4.79	4.79	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
13		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2.8	2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
14		Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	40,44	40,44	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>						
1	<b>PENDIDIKAN</b>					
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata - rata lama sekolah Penduduk	Tahun	9,38	10,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.2		Harapan lama sekolah	Tahun	13,87	13,94	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.3		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	75	79	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>				
1.4		SD/MI/Paket A	%	98,95	96,36	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.5		SMP/MTs/Paket B	%	82,37	85,63	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>				
1.6		SD/MI/Paket A	%	105,44	104,29	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.7		SMP/MTs/Paket B	%	105,03	105,03	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Kelulusan</b>				
1.8		SD	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.9		SMP	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Melanjutkan</b>				
1.10		SD ke SMP	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.11		SMP ke SMA	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Angka Putus Sekolah (APS)</b>				
1.12		- SD	%	0,016	0,016	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.13		- SMP	%	0,028	0,028	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.14		Guru yang memenuhi kualifikasi S-I/D-IV	%	98,87	98,87	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		<b>Rasio Guru dan Siswa:</b>				
1.15		SD	siswa	20	20	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.16		SMP	siswa	20	20	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.17		Persentase capaian SPM Pendidikan	%	96,9	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
2	<b>KESEHATAN</b>					

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.1	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,85	78,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.2		AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	93	93	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.3		AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	7	7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.4		AKABA (Angka Kematian Balita)	Per 1.000 KH	8,2	8,2	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.5		Stunting	%	7,55	7,55	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.6		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	95	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.7		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	72	72	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.8		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	54	54	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.9		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.10		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.11		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.12		Pelayanan Kesehatan Balita	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.13		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.14		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.15		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.16		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.17		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.18		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.19		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.20		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
<b>3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	71,09	71,09	SEKRETARIAT DAERAH
3.2		Indek layanan infrastruktur	Nilai	71,24	69,25	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.3		Akses air minum yang layak	%	100	94,31	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.4		Akses sanitasi yang layak	%	100	96,05	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.5		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	55	55	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.6		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	8,05	8,02	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.7		Prosentase drainase dalam kondisi baik	%	27,4	27,06	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.8		Rasio Bangunan Sesuai dengan Ketentuan	%	88,35	88,35	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.9		Ketaatan terhadap RTRW	%	70	70	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
4.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase lingkungan hunian layak	%	87,76	91.6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.2		Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.3		Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	35.60	32.9	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.4		Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	33.35	33.35	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.5		Prosentase PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah dan tertangani dengan baik	%	84,12	89.99	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>5</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	90,37	91,88	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.2		Persentase Penyelesaian	%	96,96	97,6	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Pelanggaran Perundang - undangan Daerah				BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.3		Persentase Penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	98,51	98,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.4		Persentase anggota satlinmas terlatih	%	58	60	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.5		Persentase tanggap kebakaran (respon time)	%	95,5	95,6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	92,25	64,13	SEKRETARIAT DAERAH
5.7		Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,45	0,64	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.8		Capaian Mitigasi Bencana	%	94	64,13	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
<b>6 SOSIAL</b>						
6.1	Dinas Sosial	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,05	5,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.2		Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,7	2,34	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.3		Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	14,31	14,31	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.4		Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	%	86,47	86,47	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6..5		Prosentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	80	80	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR</b>						
<b>1 TENAGA KERJA</b>						
1.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)	%	85	85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota)				
1.2		Produktifitas Tenaga Kerja	Angka	101.90	101.90	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
1.3		Angka Pengangguran Terbuka	Angka	20.909	20.909	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
2.1	Dinas PPKBP3A	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,53	96,53	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76,32	76,32	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.3		Rasio Kekerasan terhadap anak	Rasio	5,94444444	5,94444444	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.4		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Rasio	1 : 10.407	1 : 10.407	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>					
3.1	Dinas Pangan	Skor pola pangan harapan	%	94	94	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.2		Tingkat konsumsi energi (kalori)	%	98,4	98,4	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.3		Tingkat konsumsi protein	%	99,82	99,82	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.4		Penguatan cadangan pangan	%	31	99,75	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.5		Penanganan daerah rawan pangan	%	3,59	3,59	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.6		Ketersediaan pangan utama	%	226,9	268,4	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.7		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	94	91,11	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
<b>4</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
4.1	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	51,25	51,25	SEKRETARIAT DAERAH
4.2		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	87,25	87,25	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.3		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	31,09	31,09	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
4.4		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	70	70	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.5		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	99	99	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.6		Prosentase timbulan sampah yang dikelola	%	38,63	38,63	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.7		Prosentase Luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	64	64	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
5	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
5.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	84	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.2		Persentase terlayaninya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.3		Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jam	1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
6.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7656	0,7946	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.2		Prosentase Desa Mandiri	%	28	40,67	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.3		Prosentase berdirinya BumDes	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.4		Prosentase aparatur pemerintah desa yang dibina	%	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
7	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
7.1	Dinas PPKBP3A	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,87	0,87	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.2		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	1.85	1.85	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
						KELUARGA BERENCANA
7.3		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun(Age Spesifik Fertility Rate/ASFR)	Angka	4.90	4.90	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.4		Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	22	22	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>8</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>					
8.1	Dinas Perhubungan	Indeks Fatalitas	Angka	0,292	0,185	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.2		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,292	0,185	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.3		Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0,75	0,75	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.4		Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	24,5	18	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
<b>9</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					77
9.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	SPBE	Nilai	3,85	4.45	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.2		Nilai/Indeks Internal SPBE	Nilai	3,85	4.45	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.3		Nilai/Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	78	78	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.4		Nilai/Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	450	450	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.5		Nilai/Indeks Kemananan Informasi	Nilai	95,59	95,59	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERSANDIAN
9.6		Persentase/Cakupan Data Statistik Sektoral	%	95	99,38	URUSAN PEMERINTAHAN BID. STATISTIK
9.7		Nilai/Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,92	4,76	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.8		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	3,65	4,3	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.10		Cakupan Infrastruktur TI	%	88	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>10</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					
10.1	Dinas Perdagangan,	Prosentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	%	3,6	6,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI,

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Koperasi dan UKM					USAHA KECIL DAN UKM
10.2		Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,63	99,75	
10.3		Prosentase koperasi aktif	%	41	42,2	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
10.4		Prosentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinilai Kesehatannya untuk Koperasi	%	25	25	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
10.5		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	15	31,66	
10.6		Persentase Wirausaha Baru yang mempunyai NIB	%	4,69	9,57	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
<b>11</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>					
11.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,79	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
11.2		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Nilai	85	85,79	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
11.3		Pertumbuhan Investasi	%	24	24	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
11.4		Realisasi Investasi	%	90	100	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
<b>12</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>					
12.1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	46,48	46,48	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12.2		Cakupan pemberdayaan pemuda	%	14.25	14.25	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12.3		Cakupan prestasi olahraga	%	3.75	3.75	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<b>13</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>					
13.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	29	29	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
13.2		Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terlayani	%	40	40	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
13.3		Persentase Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	%	44	44	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
13.4		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	9	9	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
<b>14</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>					
14.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	24	24	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERPUSTAKAAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
14.2		Prosentase Pengunjung Perpustakaan Per tahun	%	44	51	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERPUSTAKAAN
<b>15</b>	<b>KEARSIPAN</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
15.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Manajemen Kearsipan	%	58	62,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEARSIPAN
15.2		Pengawasan Kearsipan Internal	%	24	27,75	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEARSIPAN
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>						
<b>1</b>	<b>PARIWISATA</b>					
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Destinasi Pariwisata yang direvitalisasi	%	67,5	67,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
1.2		Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang	158.000	158.000	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
2.3		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	245	245	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>					
2.1	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDDB sektor pertanian dan perikanan	%	3	2,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.2		Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	69,72	69,72	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.3		Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	79,65	79,65	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.4		Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	18,94	18,94	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.5		Peningkatan Produksi Padi (Ton)	Ton	8385,82	8385,82	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.6		Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	Ton	331,61	331,61	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.7		Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	Ton	51,12	51,12	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.8		Peningkatan Produksi bawang merah (Ton)	Ton	5,95	5,95	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.9		Peningkatan Produksi Cabe (Ton)	Ton	10,67	10,67	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.10		Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	Ton	5	5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.11		Peningkatan Produksi Tebu	Ton	25,71	25,71	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.12		Peningkatan Produksi Pisang	Ton	11	11	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.13		Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	Ton	6,034	6,034	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.14		Peningkatan Produksi Daging (Ton)	Ton	163,44	163,44	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.15		Peningkatan Produksi Daging Sapi (Ton)	Ton	93,2	93,2	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.16		Peningkatan Produksi Daging Kambing (Ton)	Ton	69,72	69,72	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.17		Peningkatan Produksi Daging Itik (ayam, bebek) (Ton)	Ton	79,65	79,65	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.18		Prosentase Daging ASUH	%	18,94	18,94	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
<b>3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>					

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,4	5,4	
3.2		Prosentase Kenaikan Nilai Ekspor Non-Migas	%	0,45	15,46	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.3		Prosentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	1,5	0	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.4		Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	96,1	96,1	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.5		Prosentase Pasar Tertib Ukur	%	46,1	57,7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
<b>4</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>					
4.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,06	6,06	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN
<b>5</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
5.1	Dinas Petanian dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	Ton	421,57	421,57	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.2		Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)	Rp.000	276632	276632	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.3		Angka Konsumsi Ikan	Angka	0,5	0,5	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
1.1	Sekretariat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	70	70	SEKRETARIAT DAERAH
1.2		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	84	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.3		Evaluasi kepatuhan standart pelayanan publik	Nilai	87	87	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.4		Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	75	75	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.5		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.6		cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.7		cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.8		Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.1	Sekretariat Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Legislasi	Nilai	78	80	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
2.2		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pengawasan Anggaran	Nilai	78	80	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN</b>					
1.1	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Capaian target kinerja sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	96	96	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
1.2		Persentase sinkronisasi dan sinergitas program perencanaan pembangunan daerah	%	75	75	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
1.3		Persentase capaian program RPJMD terhadap target program RPJMD	%	96	96	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>					
2.1	Badan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1.646	1.646	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.2		Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.3		Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.4		Prosentase OPD yg taat penyerapan anggaran berdasarkan kas yg telah ditetapkan	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.5		Prosentase jumlah OPD yg tepat waktu dalam penyampaian laporan akuntansi keuangan	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.6		Prosentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100%	100%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.7		Prosentase peningkatan target PAD	%	4,50%	4,50%	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>					
3.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Sistem Merit	Indeks	Kategori II (Kurang)	Kategori II (Kurang)	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
3.2		Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah		%	90,25	90,25
<b>4</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
4.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Pengembangan ASN	%	87	87	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
<b>5</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					
5.1	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbang yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	30	30	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1 INSPEKTORAT DAERAH</b>						
1.1	Inspektorat	Nilai Penguanan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	10	10	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
1.2		Level Maturitas SPIP	Level	3	3	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
1.3		Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
<b>1 KECAMATAN</b>						
1.1	Kecamatan Baki	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,8	96,8	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.2	Kecamatan Grogol	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,4	96,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.3	Kecamatan Kartasura	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,9	96,9	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.4	Kecamatan Tawangsari	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,8	97,8	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.5	Kecamatan Nguter	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,8	96,8	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.6	Kecamatan Mojolaban	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,6	96,6	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.7	Kecamatan Gatak	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,7	97,7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.8	Kecamatan Sukoharjo	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,7	97,7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.9	Kecamatan Polokarto	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,4	96,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.10	Kecamatan Bendosari	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,4	96,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.11	Kecamatan Bulu	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,4	96,4	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.12	Kecamatan Weru	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,9	95,9	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
1.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	85	85	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.2		Persentase masyarakat yang telah mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	%	92	92	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.3		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	80	80	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2025		Penanggung Jawab
				RKPD	P RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.4		Persentase Kegiatan kerukunan umat beragama	%	83	83	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
1		Pertumbuhan investasi	%	20	20	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
2		Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,62	99,62	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI DAN UMKM
3		Skor Pola Pangan Harapan	%	93,8	93,8	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
4		Persentase penanganan gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	%	87,97	87,97	SEKRETARIAT DAERAH
5		Cakupan layanan telekomunikasi	%	40%	40%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	46,48	46,48	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7		Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,646	1,646	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
8		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	14	14	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
9		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,3	5,3	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
10		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,74	5,74	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN

#### 4.3.4. Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan

Pada tabel 4.5 di bawah ini memuat seluruh indikator program prioritas dan targetnya pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025**

Kode	Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	
				RKPD	P RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Dinas P dan K					

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5- 15 dalam Satuan pendidikan	%	96,82	96,82
1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	%	100	100
1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	%	80	80
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	%	50	50
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	20	20
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	13	13
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan	%	40,00	33,33
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase even pariwisata yang dilaksanakan	%	15,00	41,67
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan	%	31,20	31,25
<b>Dinas Kesehatan</b>					
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	%	100,00	100,00
1.2.3		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100,00	100,00
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100,00	100,00
		Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	40,00	40,00
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	86,00	86,00
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	100,00	100,00
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	53,00	52,00
		Persentase Capaian UHC	%	95,00	95,00
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100,00	100,00
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100,00	100,00
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100,00	100,00
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi	%	100,00	100,00
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	%	100,00	100,00
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	94,00	94,00
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	92,00	92,00

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	100,00	100,00
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	86,00	86,00
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	30,00	30,00
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100,00	100,00
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	100,00	100,00
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	91,00	91,00
1.2.5	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	49,00	49,00
00:00:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	100,00	100,00
<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>					
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	86,00	86,00
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	30,00	30,00
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	100,00	100,00
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	%	70,93	70,73
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	%	2,32	2,35
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	%	27,4	27,06
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8,06	8,02
1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap	%	40,63	40,63
1.3.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	%	100	100
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	prosentase Daerah irigasi yang baik	%	53	55
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	88,35	88,35

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan di setiap desa/kelurahan	%	5,99	5,99
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah prov/kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	100	100
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang	%	70	70
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase penanganan sengketa tanah garapan	%	60	60
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	prosentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	80	80
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	%	75	75
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>					
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	%	100	100
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog)	%	100	100
1.4.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase penurunan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	%	20	20
1.4.6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase penerbitan sertifikat pengembang perumahan	%	100	100
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	32	32
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	100	100
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
<b>Sekretariat Daerah</b>					
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100
		Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	97	97
		Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100	100
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	%	100	100
		Cakupan pengadaan barang dan jasa	nilai	50	78
		Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100	100
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	%	90	100
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100
		Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100	100

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
<b>Sekretariat DPRD</b>					
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	90,00	90,00
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelayanan Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Bagian Anggaran dan Pengawasan	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>					
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	%	100,00	100,00
		Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	%	100,00	100,00
		Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal	%	100,00	100,00
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100,00	100,00
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	%	100,00	100,00
		Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100,00	100,00
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100,00	100,00
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Weru</b>					
7.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	80,00	100,00
7.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.14	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Bulu</b>					
7.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.14	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
7.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Tawangsari</b>					
7.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.14	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Sukoharjo</b>					
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
00:00:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Nguter</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Bendosari</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		100,00
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Polokarto</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	80,00	80,00
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Mojolaban</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Grogol</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00	100,00
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
<b>Kecamatan Baki</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Gatak</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kecamatan Kartasura</b>					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100,00
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa	%	97	97
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	89	89
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	90	90

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
	DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase pemahaman politik bagi masyarakat	%	80	80
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase masyarakat yang paham terhadap sosial, budaya, dan agama	%	83	83
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP	%	89,5	89,5
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Cakupan pendampingan dan Asistensi di bidang Pengawasan	%	100	100
00:00:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase cakupan pemenuhan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan	%	80	80
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>					
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	97,6	97,6
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98,5	98,5
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	95,6	95,6
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>					
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )	% % %	96	96
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	96	96
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	96	96
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD	%	100	100
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	100	100
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>					

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian penanggulangan bencana	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</b>					
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD	%	100,00	100,00
		Persentase OPD yg taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yg telah ditetapkan	%	100,00	100,00
		Persentase ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100,00	100,00
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100,00	100,00
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Target PAD	%	3-5%	3-5%
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Dinas Sosial</b>					
1.6.2005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	5,63	5,63
1.6.2003	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	%	100,00	100,00
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	%	73,91	73,91
1.6.2004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	19,04	19,04
1.6.2002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	86,47	86,47
1.6.2007	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100,00	100,00
0.0.1	PRROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>					
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	100,00	100,00
		Prosentase pemenuhan formasi usulan ASN	%	98,00	98,00
		Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	%	70,00	70,00
		Prosentase penanganan kasus kepegawaian	%	87,00	87,00
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	%	94,00	94,00
<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>					
2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase akurasi proyeksi indikator dalam RTK	%	90,00	90,00
2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,42	0,42

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	prosentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri ) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	83,00	83,00
2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	46,85	46,85
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	71,55	71,55
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	17,00	17,00
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	%	90,00	90,00
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara Lengkap dan Terkini	dok	8,00	8,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi	%	100,00	100,00
<b>Dinas Pangan</b>					
2.9.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	%	11,97	13,17
2.9.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	%	125,54	125,54
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	%	6,10	6,10
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Bawang Merah	%	21,20	20,50
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Cabe	%	46,80	46,00
2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	%	62,50	62,50
2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	%	37,50	37,50
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>					
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	83	83
2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	%	100	100
		Prosentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	%	30	30
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	19,56	19,56
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase ketataan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten	%	100	100
2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	%	100	100
2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	%	81	81

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	%	80	80
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah	%	70	70
		Prosentase pengurangan sampah	%	83	83
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100
<b>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>					
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	%	100,00	100,00
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	100,00	100,00
		Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100,00	100,00
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100,00	100,00
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Kegiatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100
2.13.2	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DESA	%	10,67	10,67
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan/Dibina	%	100	100
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang penyelenggaraan administrasinya tertib	%	100	100
<b>Dinas Perhubungan</b>					
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	%	71,5	71,5
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	11,49	11,49
02:15:03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	%	100	0
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	%	100	100
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	85	85
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>					
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Prosentase Ketersediaan sarana keamanan informasi	%	98,5	98,5

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	98,91	98,91
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Badan Publik Terbuka	%	99,38	99,38
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	%	98,75	98,75
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah	%	99,29	99,29
<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>					
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	%	100,00	100,00
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	83,50	83,50
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	75,00	75,00
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai Kesehatannya	%	22,00	22,00
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	28,00	28,00
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM Persentase kemitraan KUMKM	% %	28 7,33	28 7,33
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	5,00	5,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA	Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi			
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang baik	%	92,30	92,30
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga Persentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	% %	100 6,55	100 6,55
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Ekspor	%	0,40	0,40
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	38,40	38,40
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	10,00	10,00
3.30.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	%	100,00	100,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>					
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	58,33 12,02	91,89
		Persentase wirausaha muda	%		16,40

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka berprestasi	%	16,00	16,00
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	67,5 24 39,29 64,94	70,00
		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%		61,67
		Cakupan pembinaan atlet muda	%		39,29
		Persentase atlet berprestasi	%		35,18
<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>					
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	78,00	78,00
2.24.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	45,00	45,00
2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase pembinaan perpustakaan dan kegemaran membaca	%	51,00	55,00
2.23.3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	21,00	57,00
<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>					
2.8.2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	%	40,00	40,00
2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%	80,00	80,00
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	%	0,17	0,17
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	nilai	725,00	725,00
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDK	%	35,00	35,00
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	69,75	69,75
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	%	78,00	78,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
<b>Dinas Pertanian dan Perikanan</b>					
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	%	96,50	96,50

<b>Kode</b>	<b>Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	
				<b>RKPD</b>	<b>P RKPD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
		Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	93,10	93,10
		Prosentase Kelompok Menggunakan Alsintan	%	77,00	77,00
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	%	77,00	77,00
		Jumlah Luas Tanam (Ha)	Ha	49907,00	49907,00
		Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	%	47,00	47,00
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase gagal panen	%	3,00	3,00
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kenaikan nilai klas kelompok	%	2,50	2,50
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	34,00	34,00
		Jumlah Populasi ternak (animal unit)	unit	20666,02	20666,02
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berjin	%	90,00	90,00
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	%	0,10	0,10
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap	ton	404,21	404,21
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton	15172,68	15172,68
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB	Kelompok	55,00	55,00
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	%	60,00	60,00

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan kedua dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal antara lain Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait perubahan alokasi, penyesuaian perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 sesuai Peraturan Daerah tentang Pertangjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

#### **5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025**

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum beserta indikator dan targetnya.

##### **5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

###### **a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan dengan target capaian 96,82 persen.

###### **a. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan dengan target capaian 100 persen.

###### **b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan target capaian 80 persen.

## 2. **Kesehatan**

### a. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase puskesmas dengan peningkatan penyakit menular dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans dengan target capaian 100 persen, Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi dengan target capaian 73,9 persen, Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/RS Terakreditasi dengan target capaian 86,00 persen, Persentase Fasyankes lainnya terakreditasi dengan target capaian 100 persen, Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN dengan target capaian 52,00 persen, Persentase capaian UHC dengan target capaian 98,60 persen, Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu dengan target capaian 100 persen, Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan lingkungan dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan kerja dengan target capaian 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan olahraga dengan target capaian 100 persen, Persentase kepuasan pelanggan rumah sakit dengan target capaian 86,00 persen, NDR (Net Death Rate) adalah

angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar dengan target capaian 30 persen, Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna dengan target capaian 100 persen.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan) dengan target capaian 100 persen dan Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD) dengan target capaian 100 persen.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan dengan target capaian 86,00 persen.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten serta pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Desa siaga aktif mandiri dengan target capaian 65,00 persen.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dengan target capaian 80,59 persen.

**b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD dengan target capaian 2,3 persen.

**c. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio bangunan ber PBG dan SLF dengan target capaian 27,06 persen.

**d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan target capaian 8,02 persen.

**e. Program Pengembangan Permukiman**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap dengan target capaian 40,63 persen.

**f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi dengan target capaian 100 persen.

**g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Program ini

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daerah irigasi dalam kondisi baik dengan target capaian 55 persen.

#### **h. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja program ini adalah Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dengan target capaian 89,54 persen.

#### **i. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan system dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan di setiap desa/ kelurahan dengan target capaian 5,99 persen.

#### **j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah prov/kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dengan target capaian 100 persen.

#### **k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang dengan target capaian 70 persen.

### **4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

#### **a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni dengan target capaian 100 persen, Persentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog) dengan target capaian 20 persen.

#### **b. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada

Daerah Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase pemenuhan rumah yang layak dengan target capaian 100 persen.

**c. Program Kawasan Permukiman**

Dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Luas permukiman kumuh yang sudah tertangani dengan target capaian 32 hektar.

**d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penanganan PSU perumahan dengan target capaian 100 persen.

**e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan pada kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase penerbitan sertifikat pengembang perumahan dengan target **capaian 100 persen**.

**5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

**a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penegakan Perda dan Perkada dengan target capaian 97,6 persen, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan dengan target capaian 98,5 persen, Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan target capaian 100 persen, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dengan target capaian 95,6 persen.

**a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dengan target capaian 95,6 persen.

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase capaian penanggulangan bencana dengan capaian target 100 persen. Kegiatan untuk memitigasi bencana dilakukan dengan Pengurangan Resiko Bencana untuk bencana banjir dan tanah longsor.

**6. Sosial**

**a. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial dengan target capaian 5,63 persen.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan dengan target capaian 100 persen.

**c. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan dengan target capaian 100,00 persen.

**d. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target capaian 86,47 persen.

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator

kinerja yaitu Persentase pemenuhan penanganan bencana dengan target capaian 73,91 persen.

**f. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase penanganan rehabilitasi sosial dengan target capaian 19,04 persen.

### **5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja mikro dan makro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Akurasi proyeksi indikator dalam RTK dengan target capaian 90 persen.

**b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target capaian 0,42 persen.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, pengelolaan informasi pasar kerja dan pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota dengan target capaian 83 persen.

**d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target capaian 46,85 persen.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga yang Responsif Gender dengan target capaian 40 persen.

**b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia dengan target capaian 80 persen.

**c. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti dengan target capaian 100 persen.

**d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi dengan target capaian 0,17 persen.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Skor Kabupaten Layak Anak dengan target capaian 725 nilai.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti dengan target capaian 100 persen.

**3. Pangandaran**

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa/kelurahan yang mengelola lumbung pangan dengan target capaian 11,97 persen.

**b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan energi (kalori) dengan target capaian 125,54 persen, koefisien variasi harga pangan strategis telur dengan target capaian 6,1 persen, koefisien variasi harga pangan strategis bawang merah dengan target capaian 21,2 persen, koefisien variasi harga pangan strategis cabe dengan target capaian 46,8 persen.

**c. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa/kelurahan rawan pangan yang ditangani dengan target capaian 62,5 persen.

**d. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jenis pangan yang dilakukan pengawasan dengan target capaian 37,5 persen.

**4. Pertanahan****a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan sengketa tanah garapan dengan target capaian 60 persen.

**b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah dengan target capaian 80 persen.

**c. Program Penatagunaan Tanah**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan perencanaan penatagunaan tanah dengan target capaian 75 persen.

## **5. Lingkungan Hidup**

### **a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten dan penyelenggaraan KLHS kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan target capaian 83 persen.

### **b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator yaitu Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan dengan target capaian 100 persen, persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan target capaian 30 persen.

### **c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yaitu Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH) dengan target capaian 38,63 persen.

### **d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu persentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten dengan target capaian 100 persen.

### **e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketepatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten dengan target capaian 100 persen.

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan dengan target capaian 81 persen.

**g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penghargaan lingkungan hidup dengan target capaian 80 persen.

**h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan target capaian 100 persen.

**i. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pengelolaan Sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penanganan sampah dengan target capaian 70 persen, persentase pengurangan sampah dengan target capaian 30 persen.

**6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk indicator kinerja yaitu Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan dengan target capaian 100 persen.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target capaian 100 persen.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Program ini dilaksanakan mencapai indicator kinerja yaitu Persentase validitas data kependudukan dengan target capaian 100 persen, Cakupan lembaga pengguna yang kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan target capaian 100 persen.

**d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan. Program ini dilaksanakan mencapai indicator kinerja yaitu Persentase pengelolaan profil kependudukan dengan target capaian 100 persen.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

### **a. Program Penataan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong penyelenggaraan penataan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa dengan target capaian 100 persen.

### **b. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase desa yang melaksanakan kerjasama desa dengan target capaian 10,67 persen.

### **c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase desa yang penyelenggaraan administrasinya tertib dengan target capaian 100 persen.

### **d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan/dibina dengan target capaian 100 persen.

## **8. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

### **a. Program Penataan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong penyelenggaraan penataan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa dengan target capaian 100 persen.

### **b. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase desa yang melaksanakan kerjasama desa dengan target capaian 8,67 persen.

### **c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase desa yang penyelenggaraan administrasinya tertib dengan target capaian 53,33 persen.

**d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan/dibina dengan target capaian 50 persen.

**9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK dengan target capaian 35 persen.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Peserta KB Aktif dengan target capaian 69,75 persen.

**c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan kelompok kegiatan yang aktif dengan target capaian 78 persen, yang dapat dilihat dari cakupan anggota aktif kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS, serta mendukung meningkatnya kualitas pelayanan PIK R di masing-masing kecamatan.

**10. Perhubungan**

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di jalan,

pengelolaan terminal penumpang Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kendaraan bermotor wajib uji dengan target capaian 71,50 persen, Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum dengan target capaian 11,49 persen.

**b. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kinerja layanan penyeberangan sungai dengan target capaian 0 persen, dikarenakan pada tahun 2023 Penyeberangan di Beton sudah ditutup sehingga sudah tidak beroperasi lagi.

**c. Program Pengelolaan Perkeretaapian**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kinerja layanan perkeretaapian dengan target capaian 100 persen.

**d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan target capaian 85 persen.

## **11. Komunikasi dan Informatika**

**a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Badan Publik Terbuka dengan target capaian 99,38 persen.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten, dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu dan persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah dengan target capaian 99,29 persen, Persentase pengembangan

aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik dengan target capaian 98,75 persen.

## **12. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

### **a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Permohonan ijin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP dengan target capaian 100 persen.

### **b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Koperasi aktif dengan target capaian 83,5 persen.

### **c. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan dengan target capaian 75 persen.

### **d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya dengan target capaian 22 persen.

### **e. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM dengan target capaian 28 persen.

### **f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Pogram ini dilakukan untuk mencapai

indikator kinerja yaitu Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM dengan target capaian 28 persen, Persentase kemitraan dengan target capaian 7,33 persen. didalamnya ada aktifitas/pekerjaan pelatihan E-commerce bagi UMKM” dan Narasi “Pemberian bantuan Sarana produksi bagi UMKM

**g. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi dengan target capaian 5 persen.

**13. Penanaman Modal**

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi dengan target capaian 100 persen, Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo dengan target capaian 100 persen.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo dengan target capaian 100 persen.

**c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal dengan target capaian 100 persen.

**d. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi dengan target capaian 100 persen, Persentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal dengan target capaian 100 persen, Cakupan Pelayanan Penaman Modal yang Optimal dengan target capaian 100 persen.

**e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target capaian 100 persen.

#### **14. Kepemudaan Dan Olah Raga**

##### **a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dengan target capaian 58,33 persen dan Persentase wirausaha muda dengan target capaian 12,02 persen.

##### **b. Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga dengan target capaian 67,5 persen, Cakupan Pelatih yg bersertifikasi dengan target capaian 24 persen, Cakupan pembinaan atlet muda dengan target capaian 39,29 persen, dan Persentase atlet berprestasi dengan target capaian 64,94 persen.

##### **c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pramuka berprestasi dengan target capaian 16 persen.

#### **15. Statistik**

##### **a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral dengan target capaian 85 persen.

#### **16. Persandian**

##### **a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Keamanan Informasi dengan target capaian 65 persen.

## **17. Kebudayaan**

### **a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten, dan pembinaan lembaga adat yang pengaruhnya dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang dengan target capaian 40 persen.

### **b. Program Pembinaan Sejarah**

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan dengan target capaian 20 persen

### **c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan dengan target capaian 9 persen.

## **18. Perpustakaan**

### **a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten, dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca dengan target capaian 55,00 persen.

### **b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan target capaian 57 persen.

## **19. Kearsipan**

### **a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten, dan pengelolaan simpul jaringan informasi karsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan target capaian 78,00 persen.

**b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan target capaian 45,00 persen.

**5.1.3. Urusan Pilihan**

**1. Kelautan Dan Perikanan**

**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi perikanan Tangkap dengan target capaian 404,21 ton.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi Perikanan Budidaya dengan target capaian 15172,68 ton.

**c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB dengan target capaian 55 rumah tangga perikanan.

**d. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP) dengan target capaian 60 persen.

**2. Pariwisata**

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daya

Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan dengan target capaian 40 persen.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase event pariwisata yang diadakan dengan target capaian 15 persen.

**c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan dengan target capaian 31,2 persen.

**3. Pertanian**

**a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten, dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dengan target capaian 96,5 persen, Persentase penggunaan benih padi bersertifikat dengan target capaian 93,1 persen, Persentase kelompok menggunakan alsintan dengan target capaian 77 persen.

**b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani dengan target capaian 77 persen, Jumlah Luas Tanam (Ha) dengan capaian target 49815 hektar, dan Persentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi dengan target capaian 47 persen.

**c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase gagal panen dengan target capaian 3 persen.

**d. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kenaikan nilai klas kelompok dengan target capaian 2,5 persen.

**e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten, dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan target capaian 34 persen, dan Jumlah Populasi ternak (animal unit) dengan target capaian 20666,02 unit.

**f. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berjalan dengan target capaian 90 persen.

**g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengendalian penyakit Zoonosis dengan target capaian 0,1 persen.

**4. Perdagangan**

**a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar Rakyat yang baik dengan target capaian 92,3 persen.

**b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

Program ini diarahkan untuk kegiatan yang meliputi pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengendalian Harga dengan target capaian 100 persen dan Persentase Kios Pupuk Lengkap (KPL) dengan target capaian 6,55 persen.

**c. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Ekspor dengan target capaian 0,4 persen.

**d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**

Program ini difokuskan untuk kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar Tertib Ukur dengan target capaian 38,4 persen.

**e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran dengan target capaian 10 persen.

**f. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan dengan target capaian 100 persen.

**5. Perindustrian**

**a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terselesaikannya dokumen RPIPK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda dengan target capaian 17 persen.

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan dengan target capaian 90 persen.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan target capaian 8 persen.

**6. Transmigrasi**

**a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Program ini diarahkan untuk kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Terpenuhinya Alokasi Pemberangkatan Transmigrasi dengan target capaian 100 persen.

#### **5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **1. Sekretariat Daerah**

###### **a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan target capaian 100 persen, Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum dengan target capaian 97 persen, Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah dengan target capaian 100 persen.

###### **b. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan dengan target capaian 100 persen; Cakupan pengadaan barang dan jasa dengan target capaian 50 persen; Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA dengan target capaian 100 persen.

##### **2. Sekretariat DPRD**

###### **a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Program ini diarahkan untuk kegiatan indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan capaian target 100 persen, Persentase pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bagian anggaran dan pengawasan dengan target capaian 100 persen.

#### **5.1.1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **1. Perencanaan**

###### **a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia . Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan ketercapaian target tahunan terhadap sasaran RPJMD melalui penyusunan dokumen

perencanaan lingkup bidang. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target capaian 100 persen, Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target capaian 100 persen, Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target capaian 100 persen.

**b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan .Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dengan target capaian 100 persen.

**1. Keuangan**

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Program ini dilaksanakan dalam upaya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD dengan target capaian 100 persen, Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan target capaian 100 persen, Persentase ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target capaian 100 persen.Dalam upaya pencapaian target target indikator program pengelolaan keuangan daerah terdapat aktifitas/pekerjaan dalam Pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah dengan target capaian 100 persen.

**c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan guna mewujudkan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan target APD dengan target capaian 3-5 persen.

## **2. Kepegawaian**

### **a. Program Kepegawaian Daerah**

Program ini diorientasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas ASN, pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian dengan target capaian 100 persen, Persentase pemenuhan formasi usulan ASN dengan target capaian 98 persen, Persentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan dengan target capaian 70 persen, dan Persentase penanganan kasus kepegawaian dengan target capaian 87 persen.

## **3. Pendidikan dan Pelatihan**

### **a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini diorientasikan untuk kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana dengan target capaian 94 persen.

## **4. Penelitian dan Pengembangan**

### **a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Program ini diorientasikan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Program ini dilaksanakan guna mendukung pengembangan daerah dengan penerapannya diarahkan pada kegiatan pengelolaan data kelitbangam, pengembangan inovasi serta perekayasaan di bidang teknologi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan target capaian 100 persen.

### **5.1.2. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

#### **1. Inspektorat Daerah**

##### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP dengan target capaian 89,50 persen.

##### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi. Indikator kinerja yang akan

dicapai yaitu Persentase cakupan pendampingan dan asistensi di bidang Pengawasan dengan target capaian 100 persen.

#### **5.1.5. Unsur Kewilayahani**

##### **1. Kecamatan**

###### **a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan target capaian 100 persen.

###### **b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target capaian 80 persen.

###### **c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase capaian ketenteraman dan ketertiban umum dengan target capaian 100 persen.

###### **d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target capaian 100 persen.

###### **e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan target capaian 100 persen.

#### **5.1.6. Unsur Pemerintahan Umum**

##### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

###### **a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan masyarakat yang paham

ideologi pancasila dan karakter bangsa dengan target capaian 97 persen.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemahaman politik bagi masyarakat dengan target capaian 80 persen.

**c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas dengan target capaian 89 persen.

**d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan kejadian terkait konflik social dengan target capaian 90 persen.

**e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap social, budaya, dan agama dengan target capaian 83 persen.

Secara rinci perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 5.1  
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Perubahan RKPD Tahun 2025